LAPORAN KINERJA (LKj)

KECAMATAN BUMI MAKMUR

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BUMI MAKMUR

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail..com

KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR
NOMOR : 900.1.11/ 05 /SEKRT/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024
KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT BUMI MAKMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi Good Governance dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;

b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Bumi Makmur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bumi Makmur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51 Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang omor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN / 11 /2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 47);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Kecamatan Bumi Makmur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas

a. Menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
b. Mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
c. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah

Laut;

d. Menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;

e. Mengoreksi penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut;

f. Mendiskusikan dengan bidang terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut; dan

g. Mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Camat Bumi Makmur;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut DPA - SKPD Kecamatan Bumi Makmur.;

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Makmur
Pada tanggal 02 Desember 2024

Plt. Camat Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR
NOMOR : 900.1.11/ 05 /SEKRT/2024
TANGGAL : 02 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2024 KECAMATAN BUMI MAKMUR

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kasi Pelayanan	Anggota
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi Trantib	Anggota
6.	Kasi PMDK	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasubbag Umum & Kepegawain	Anggota

Plt. Camat Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunianya jualah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja (LKj) pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut pada tahun berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak terkait dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terimakasih. Semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebagai motivasi dalam rangka peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bumi Makmur, 20 Januari 2025

PLt. CAMAT BUMI MAKMUR,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP.19891025 201010 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja pertama RPD 2024-2026. Selain media pertanggung jawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa1 sasaran yang diukur 1 Indikator kinerja Utama dan 2 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 2 indikator Kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 ***Sangat Memuaskan.*** Hal ini,didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2024 dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja Sangat memuaskan.** Indikator kinerja program yang terdiri dari 2 sasaran dan 3 Indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh

indikator sementara adalah 95,15 %.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2024 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Bumi Makmur, 20 Januari 2024
CAMAT BUMI MAKMUR,

PLt. CAMAT BUMI MAKMUR,

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP.19891025 201010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud Dan Tujuan 2
C. Dasar Hukum 2
D. Cascading Kinerja 5
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi 5
F. Isu Strategis Perangkat Daerah 14
G. Dukungan Sdm Sarana Prasarana Dan Anggaran 17
H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya 21
I. Sistematika Penyajian 23
BAB II 25
PERENCANAAN KINERJA 25
A. TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN 25
B. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 29
C. PERJANJIAN KINERJA 2024 29
D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA 34
BAB III 38
AKUNTABILITAS KINERJA 38
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI 38
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 123
BAB IV 126
PENUTUP 126
A. KESIMPULAN 126
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 127
LAMPIRAN – LAMPIRAN 128

KECAMATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa serta bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mengamanatkan bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan menetapkan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan di capai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efisien dan efektif. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya, sehingga kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai oleh pihak yang berkewenangan.

Dari pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

1. Seberapa jauh efiesiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan.
3. Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
4. Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatanpemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur, sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi,misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan Pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2024.Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Bumi Makmur untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh Stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Bumi Makmur sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menpan&Rb No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sakip
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);

D. Cascading Kinerja

Data Terlampir

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, antara lain :

1. Perijinan, dalam hal ini Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersil
2. Koordinasi dan fasilitasi
3. Pelayanan kepada masyarakat
4. Pembinaan kepada pemerintahan desa

Adapun jenis produk dan layanan yang ada pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur yang di laksanakan selama ini antara lain:

1. Pelayanan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersil untuk bangunan permanen, semi permanen dan non permanen.
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kematian,Kia
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Pelayanan pembuatan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
5. Pelayanan pembuatan Surat Ijin Usaha
6. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
7. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
8. Pelayanan pembuatan Surat Pengantar Pindah Keluar Kecamatan/Kabupaten
9. Pelayanan pengajuan subsidi listrik PLN
10. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

11. Pelayanan pengajuan proposal untuk suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Untuk lebih meningkatkan produk dan layanan yang maksimal agar SKPD Kecamatan Bumi Makmur menjadi lebih baik, antara lain :

1. Pelayanan prima, Kecamatan Bumi Makmur sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Tanah Laut yang menyelengggarakan pelayanan Publik harus mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, gratis, memiliki legalitas hukum dan tentunya berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaran pelayanan prima tersebut diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong perkembangan dinamika aktivitas masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah ideal danmemiliki persyaratan secara kuantitas, oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.

Pemanfaatan Peluang kebijakan penyerahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah, dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan Pemerintah, non Pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakatnya dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah, berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai berikut :

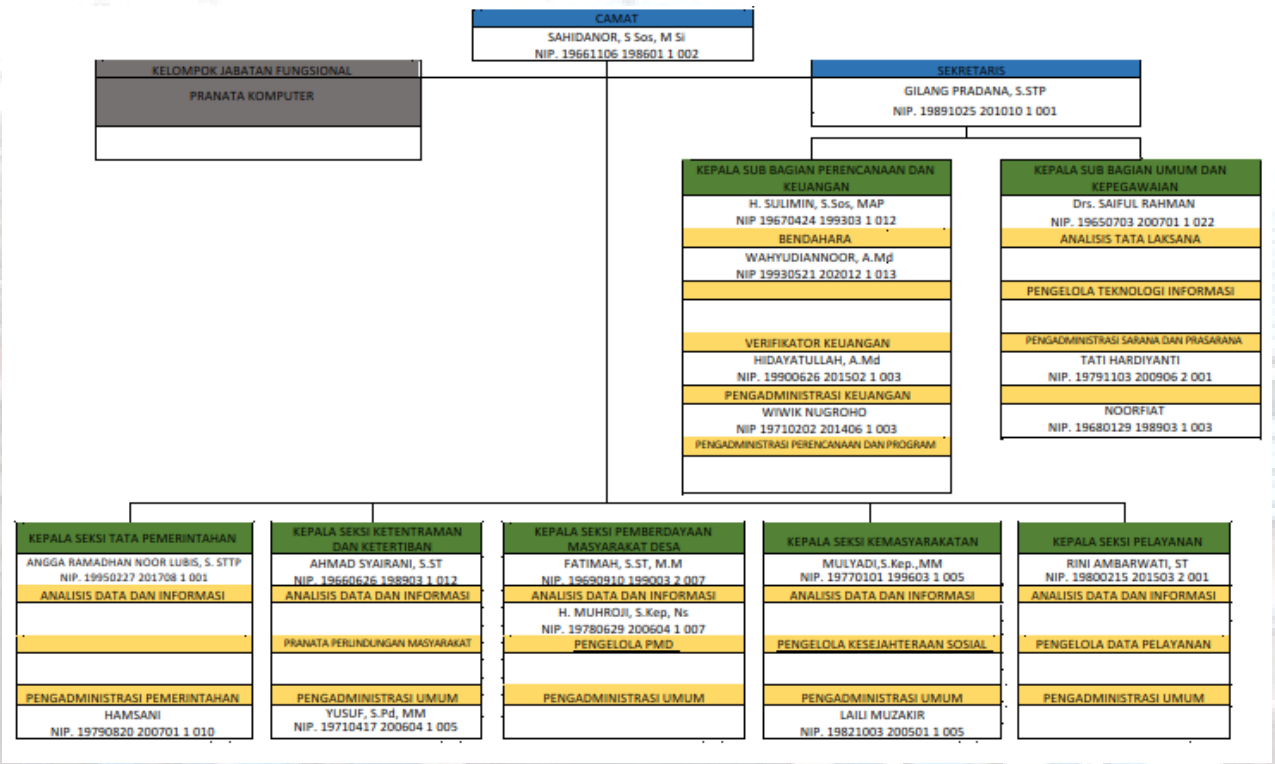

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

Susunan organisasi SKPD Kecamatan Bumi Makmur terdiri dari ;

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi, terdiri dari :
   a. Seksi Tata Pemerintahan
   b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
   c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
   d. Seksi Kemasyarakatan
   e. Seksi Pelayanan

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Camat

1) Mempunyai tugas :

a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraanketentrama n dan ketertiban umum;
d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

2) Menyelenggarakan fungsi :

a) Perencanaan kegiatan kecamatan
b) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
c) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaanprasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
d) Pembinaan pemerintahan desa
e) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

f) Penyelenggaraan tata usaha kecamatan

g) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan di lingkungan kecamatan

h) Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

2. Sekretariat

1) Mempunyai tugas :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

a) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan

b) Pemberian pelayanan administrasi kepada seksi - seksi lain dilingkungan Kecamatan

c) Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan

d) Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang layanan sesuaidengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan

e) Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan

f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang

g) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan

h) Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan

i) Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

k) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

2) Menyelenggarakan fungsi :

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

3. Seksi-seksi

Terdiri dari beberapa bagian dan fungsinya masing-masing, yaitu :

a. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
2) Melaksanakan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai denganbidang tugasnya.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan ketertiban;
2) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan; dan

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang KepalaSeksi dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasidan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2) Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
3) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

d. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasidan pelaporan urusan kemasyarakatan;
2) Menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan; Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan,penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyaitugassebagai berikut :

1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasidan pelaporan urusan pelayanan
2) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional :

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang

dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku

2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diaturdan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat
5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja
6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur hingga saat ini per 31 Desember 2024, memiliki PNS berjumlah 18 (Delapan belas)orang, namun 1 (satu) orang PNS Cuti menjadi Kepala Desa Handil Babirik dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 5 (Lima) orang.

Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bumi Makmur dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan struktural dan staf/pelaksana serta fungsional, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan, Pengkat dan Golongan Ruang, Jabatan Struktural dan Fungsional

a.	**Tingkat Kualifikasi Pendidikan:**	
-	Strata Dua (S.2)	:7 orang
-	Strata Satu (S.1)	:3 orang
-	Diploma Empat (D.IV)	:0 orang
-	Diploma Tiga (D.III)	:3 orang
-	Setingkat SLTA/ sederajat	:5 orang
b.	**Pangkat dan Golongan Ruang:**	
-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:1 orang
-	Pembina (IV/a)	:3 orang
-	Penata Tingkat I (III/d)	:3 orang
-	Penata (III/c)	:3 orang
-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:1 orang
-	Penata Muda (III/a)	:1 orang
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:2 orang
-	Pengatur (II/c)	:2 orang
-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:1 orang
-	Pengatur Muda (II/a)	:0 orang
-	Juru Tingkat I (I/d)	:0 orang
-	Juru (I/c)	:0 orang
-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:0 orang
-	Juru Muda (I/a)	:0 orang
c.	**Jabatan Struktural:**	
-	Eselon III A (Camat)	:1 orang
-	Eselon III B (Sekretaris Camat)	:1 orang
-	Eselon IV A(Kepala Seksi)	:4 orang
-	Eselon IV B(Kepala Sub Bagian)	:2 orang
-	Staf/Pelaksana	:10 orang
-	Kelompok Jabatan Fungsional	:0 orang

Tabel 1.2. PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan, Pengkat dan GolonganRuang, Jabatan Struktural dan Fungsional

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	SAHIDANOR, S.Sos.,M.Si NIP. 19661106 198601 1 002	Pembina Tingkat I IV/b	Camat	S2
2	GILANG PRADANA, STP,M.IP NIP. 19891025 201010 1 001	Penata Tingkat I III/d	Sekretaris Kecamatan	S2
3	FATIMAH, S.ST,. MM NIP. 19690910 199003 2 007	Pembina IV/a	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S2
4	MULYADI, S. Kep, MM NIP. 19770101 199603 1 005	Pembina IV/a	Kepala Seksi Kemasyarakatan	S2
5	RINI AMBARWATI, ST, M.Sos NIP. 19800215 201503 3 001	Penata III/c	Kepala Seksi Pelayanan	S2
6	AHMAD SYAIRANI, S.ST NIP. 19660626 198903 1 012	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	S1
7	ANGGA RAMADHAN NL,S.STP NIP. 19950227 201708 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	S1
8	H. SULIMIN, S.Sos,MAP NIP. 19670424 199303 1 012	Pembina IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	S2
9	TATI HARDIYANTI NIP. 19791103 200906 2 001	Pengatur II/c	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pengadministrasi Sarana dan Prasarana padaSub Bag Umum dan Kepegawaian	DIII
10	YUSUP, S.Pd, MM 19710417 200604 1 005	Penata Tingkat I III/d	Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban	S2
11	MUHROJI, S.Kep.Ns NIP. 19821003 200501 1 005	Penata III/c	Analis Data dan Informasi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S1
12	NOORFIAT NIP. 19680129 198903 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Pengadministrasi Umum pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian	SLTA
13	HIDAYATULLAH, A.Md NIP. 19900626 201502 1 003	Pengatur Muda III/a	Verifikator Keuangan	DIII
14	WAHYUDIANNOOR, A.Md NIP. 19791103 200906 2 001	Pengatur II/c	Pengolah Data Pelayanan	SLTA
15	HAMSANI NIP. 19790820 200701 1 010	Pengatur II/c	Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi TataPemerintahan	SLTA
16	AMIR MAHMUD NIP. 19701004 200701 1 031	Pengatur II/c	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan	SLTA
17	WIWIK NUGROHO NIP. 19710202 201406 1 003	Pengatur Muda Tk I II/b	Pengadministrasi keuangan pada Sub BagianPerencanaan dan Keuangan	SLTA
18	LAILI MUZAKIR NIP. 19821003 200501 1 005	Pengatur Muda II/a	Pengadministrasi pada Kasi Kemasyarakatan	SLTA

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapatdiidentifikasi

beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. **Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.**

   Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasikan permasalahan yaitu :

   1) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   2) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip;
   3) Letak Geografis dan Kondisi wilayah yang rentan terjadi bencana tahunan seperti Banjir, Kebakaran Lahan dan Angin Puting Beliung

2. **Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.**

   Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasikan permasalahan yaitu:

   1) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
   2) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
   3) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten;
   4) Belum optimalnya Penyusunan APBDES;
   5) Belum optimalnya desa yang administrasi pengelolaan keuangannya yang baik.
   6) BUMDes yang belum berjalan secara optimal.

3. **Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.**

   Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN di identifikasikan permasalahan yaitu:

   1) Masih kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bumi Makmur;
   2) Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bumi Makmur masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan Komputer dan peralatan penunjangnya;
   3) Masih kurangnya kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik;
   4) Masih terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan.

   Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihatdalam tabel berikut :

Tabel 1.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan SasaranPembangunan Daerah SKPD Kecamatan Bumi Makmur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya keterlibatan masyarakatdalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	
		Letak Geografis dan Kondisi wilayah yang rentan terjadi bencana tahunan seperti Banjir, Kebakaran Lahan dan Angin Puting Beliung	Faktor Alami dari Alam dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pencegahan Bencana
2	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompokrentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat keaktifanlembaga kemasyarakatan di desa	
		Belum optimalnya Penyusunan APBDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum optimalnya desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	
		BUMDes yang belum berjalan secara optimal	Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan dari Desa
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Masih kurangnya jumlah personil diKecamatan Bumi Makmur	Belum terisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
		Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bumi Makmur	Kurangnya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan.	
		Kompetensi SDM masih perlu dibenahi.	Kurangnya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2) Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3) Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

G. Dukungan Sdm Sarana Prasarana Dan Anggaran

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya yang ada pada Kecamatan Bumi Makmur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan pada Kecamatan Bumi Makmur

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kepala Seksi	5
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Staf	9
6	PTT	5

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Bumi Makmur masih sangat memerlukan tambahan pegawai sehingga kondisi beban kerja yang ada pada masing masing Kepala Seksi dan Kepala sub bagian dapat berjalan dengan baik.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Bumi Makmur di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4 Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Bumi Makmur

		Jumlah Yang	Kondisi		
No.	Nama Barang	Ada	B	KB	RB
1	Tanah Bangunan kantor	1	1		
2	Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah)	2	1	1	
3	Sepeda Motor	11	9	2	
4	Mesin Ketik Manual standard (14-16 incl)	1	1		
5	Lemari Besi / Metal	15	15		
6	Rak Besi	4	4		
7	Filing Cabinet Besi	7	7		
8	Lemari Makan	1	1		
9	Mesin Laminating	1	1		
10	Alat Kantor Lainnya	2	2		
11	Meja kerja Kayu	16	12	4	
12	Meja Podium	1	1		
13	Kasur / Spring Bed	1	1		
14	Meja Makan Besi	1	1		
15	Kursi Rapat	75	50	25	

16	Kursi Tamu	7	7		
17	Kursi Putar	11	8	3	
18	Termometer Standar	3	3		
19	Kursi Lipat	40	20	20	
20	Sofa	2	2		
21	Meubeleur Lainnya	1	1		
22	Jam Elektronik	1	1		
23	Alat Pembersih Lainnya	4	4		
24	Lemari Es	1	1		
25	A.C,Split	7	2	5	
26	Kipas Angin	9	5	4	
27	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1		
28	Treng Air / Tandon Air	1		1	
29	Televisi	1	1		
30	Sound System	1		1	
31	Stabilisator	5	3	2	
32	Tiang Bendera	2	2		
33	Tangga Aluminium	1		1	
34	Unit Power Supply	4	4		
35	Gordyn/Kray	15	9	6	
36	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	3	3		
37	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	1		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
39	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3	3		
40	Camera Electronic	2	2		
41	Layar Film / Projector	1	1		
42	Uninterupted Power Supply (ups)	2		2	
43	P.C Unit	7	7		
44	Laptop	10	7	3	
45	Note Book	1	1		
46	Printer (Peralatan Personal komputer)	12	7	5	
47	Scanner (Peralatan Personal komputer)	2	2		
48	Exsternal / Portabel Hardisk	2	2		
49	Peralatan Jaringan lainnya	1	1		
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
51	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		
52	Bangunan Gedung Kantor lain-lain (dst)	1	1		
53	Bangunan Tempat Kerja lain-lain (dst)	1	1		

54	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1			1
55	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1		
		310	224	85	1

3. Anggaran

Kecamatan Bumi Makmur di tahun anggaran 2024 memiliki Pagu Murni **Rp**. **5.014.796.696,-** dan Pagu Perubahan **Rp. 5.329.365.974,-** dengan 4 (Empat) Program yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan, Adapun Rincian Anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.5 Rincian Anggaran Pagu Sebelum dan Sesudah Perubahan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.655.223.723,00**	**3.969.793.001,00**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.957.557.763,00**	**3.107.557.763,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.557.763,00	3.107.557.763,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22.005.750,00**	**22.005.750,00**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.005.750,00	22.005.750,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**317.815.974,00**	**454.635.252,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.957.072,00	2.957.072,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.049.596,00	136.368.874,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.972.195,00	3.972.195,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.998.452,00	7.998.452,00
Penyediaan Bahan/Material	21.838.659,00	21.838.659,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	281.500.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0,00**	**0,00**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**264.844.236,00**	**292.594.236,00**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.700.000,00	111.450.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236,00	181.144.236,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	63.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**59.896.917,00**	**59.896.917,00**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**59.896.917,00**	**59.896.917,00**
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.997.672,00	4.997.672,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.899.245,00	54.899.245,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**0,00**	**0,00**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**0,00**	**0,00**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,00	0,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0,00	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**0,00**	**0,00**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**0,00**	**0,00**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**1.263.891.540,00**	**1.263.891.540,00**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**1.263.891.540,00**	**1.263.891.540,00**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.387.817,00	99.387.817,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.119.595.094,00	1.119.595.094,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.908.629,00	44.908.629,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**35.784.516,00**	**35.784.516,00**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**35.784.516,00**	**35.784.516,00**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.840.000,00	9.840.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.985.000,00	14.985.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.959.516,00	10.959.516,00
TOTAL ANGGARAN	**5.014.796.696**	**5.329.365.974**

H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut SKPD Nomor 700.1.2.1/71/LHEAKIP-Irban III/Insp/2024 tanggal 01 April 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Tabel Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas AKIP Tahun 2023

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas AKIP Tahun 2023

NO	KOMPONEN	SARAN / REKOMENDASI		TINDAK LANJUT	
a.	Perencanaan Kinerja	1	Penyusunan perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi.tentang- hubungan kinerja, strategi dan kebijakan;	1	Menyusun perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan ;

		2	Pimpinan belum sepenuhnya terlibat dalam pencapaian kinerja;	2	Pimpinan akan sepenuhnya terlibat dalam pencapaian kinerja ;
		3	Masih terdapat perbedaan indikator kinerja pada tiap - tiap dokumen Kinerja	3	Memperbaiki perbedaan indikator kinerja pada tiap-tiap dokumen kinerja
b.	Pengukuran Kinerja	1	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) namun belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran;	1	Pengukuran kinerja yang telah dilakukan secara berkala (triwulan) akan sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran;
		2	SKPD telah melakukan perubahan Renja, namun perubahan tersebut belum berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan);	2	Dalam hal melakukan perubahan Renja, perubahan tersebut akan disesuaikan sesuai hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwutan);
		3	Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinera (SKP) berdasarkan kinerja yang dijanjikan (PK) namun pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja belum menyajikan umpan balik yang berkelanjutan	3	Pimpinan akan menyajikan feedback setiap pegawai yang telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang dijanjikan (PK yang berkelanjutan);
c	Pelaporan Kinerja	1	Belum dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang talah dlsusun. sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai;	1	Akan melakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah dlsusun. sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai;
		2	laporan kinerja berkala telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja;	2	laporan kinerja berkala telah disusun, akan sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja;
		3	Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;	3	Laporan kinerja telah disusun, akan sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
		4	Dokumen kinerja belum sepenuhnya menggambarkan terkait proses pencapaian kinerja atas IKU SKPD ataupun analisis hanya menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi dengan penjelasan yang belum cukup memadai mengenai cara-cara ataupun hal--hal yang rnendukung pencapaian kinerja.	4	Dokumen kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan terkait proses pencapaian kinerja atas IKU SKPD ataupun analisis yang hanya menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi dengan penjelasan yang belum cukup memadai mengenai cara-cara ataupun hal--hal yang rnendukung pencapaian kinerja akan diperbaiki.
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya, namun belurn sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	5	Monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala (bulanan maupun triwulan)

I. Sistematika Penyajian

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2024 sesuai surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 000.8.6.3/3745/ORG tanggal 14 Desember 2024 perihal penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2024

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISi

Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Hukum
D. Cascading Kinerja
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
F. Isu Strategis Perangkat Daerah
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
I. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Perjanjian Kinerja Tahun 20:XX
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi Yang berisikan sebagai berikut:
   a. Pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon 11)
   b. Analisa capaian kinerja tahun 20:XX dan perbandingan kinerja tahun 20:XX dengan realisasi
   c. Analisa keberhasilan/kegagalan, hambatan dan langkah- langkah antisipasi yang diambil.
B. Akuntabilitas Keuangan
   1. Anggaran dan Realisasi APBD 20:XX
   2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
   3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 20:XX dan 20:XX

Bab IV Penutup
A. Kesimpulan
B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1. IKU
2. Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja
4. Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
5. Monev Renstra
6. Matriks Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumber daya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat

menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen RPD 2024-2026 disusun dengan tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2024 diambil dari tujuan dan sasaran pada dokumen RPD 2024-2026. Berikut Tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya pada tahun 2024.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	REALISASI 2023	PROYEKSI RKPD 2024	TARGET 2025
1	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**		**IPM**	**72,98**	**70,80**	***73,50 – 74,00**
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,41	12,37	*12,39
			Angka Rata- Rata Lama Sekolah	7,92	8,05	*8,15
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	70,11	69,96	*75
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	-	40	45
			Persentase atlet berprestasi	-	85	90

	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,22	87,32	87,34
2	**Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrasturktur yang berwawasan lingkungan**		**Pertumbuhan Ekonomi**	**4,78**	**4,6 - 5,0**	**4,8 – 5,8***
			Gini Ratio	**0,259**	**0,229**	**0,259 – 0,171***
			Angka Kemiskinan	**3,73**	**3,45**	***2,93-3,30**
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	2,06	2,85	2.9
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	5,33	3,52	3,55
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	4,81	4,9	4.95
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	12,10	11,75	11,70
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	5	5	5
	2.6	Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	-	47,91	54,21
	2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	IKLH	68,65	68,57	*70,16
			Indeks Resiko Bencana	153,2l	150,1	*147
	2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	29.37	17,5	20
	2.9	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	83,45	82,6	82,8

	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,58	3,45	*2,70-3,55
	2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	0,74	0,74	0,75
3	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**72,87**	**62**	**62**
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	67.52	70.01 (B)	75.00 (B)
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80.83	66 (PB)	71 (PB)
	3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik	4,10	4,54 / A	4,4*
	3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,12	3,2	3,15*

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 -2026. RKPD Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 serta sebagai Baseline Data untuk RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2045. Dokumen RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD dengan tema **“PENINGKATAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING”.**

B. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPD 2024-2026, Kecamatan Bumi Makmur beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2024-2026. Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bumi Makmur adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik
2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2 Sasaran strategis, indikator dan target Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	TAHUN 2024	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,45	0,36
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	92,13
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	75,00	72,10

C. PERJANJIAN KINERJA 2024

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau

kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal makaditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bumi Makmur disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manejemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel. 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	

Perjanjian kinerja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

1. Perjanjian Kinerja Eselon III (Camat Bumi Makmur)

Tabel. 2.4. Perjanjian Kinerja Camat

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,45
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai SAKIP Kecamatan Bumi Makmur	75,00

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis kinerja camat yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik dengan indikator Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan targetnya 0,45 dan Indeks Kepuasan Masyarakat targetnya Nilai 90.

2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris Camat Bumi Makmur)

Tabel. 2.5. Perjanjian Kinerja Sekretaris Camat

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	22
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	22
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	11
4	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	100

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis kinerja Sekretaris Camat yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Kualitas Evaluasi Internal dengan target kumulatif 75 serta sasaran Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100%.

3. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Camat, Eselon III dan Eselon IV Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

Tabel. 2.6. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
CAMAT		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,45
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Skala
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai SAKIP Kecamatan Bumi Makmur	75
SEKRETARIS CAMAT		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	22 Nilai
Meningkatnya Kualitas Pengukuran	Nilai Komponen Pengukuran	22 Nilai
Meningkatnya Kualitas Pelaporan	Nilai Komponen Pelaporan	11 Nilai
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20 Nilai
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian PD	100%
KASI PELAYANAN		
KINERJA KEGIATAN		
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
KINERJA SUB KEGIATAN		
Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan
Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11 Dokumen
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
KINERJA KEGIATAN		
Meningkatnya Layanan terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%
KINERJA SUB KEGIATAN		
Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen
Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-
KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
KINERJA KEGIATAN		

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100%
KINERJA SUB KEGIATAN		
Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	8 Jenis
KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
KINERJA KEGIATAN		
Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Gangguan
KINERJA SUB KEGIATAN		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11 Laporan
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11 Laporan
KASI TATA PEMERINTAHAN		
KINERJA KEGIATAN		
Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%
KINERJA SUB KEGIATAN		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Dokumen
Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	15 Orang
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
KINERJA KEGIATAN		
Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Nilai
KINERJA SUB KEGIATAN		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
KINERJA KEGIATAN		
Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
KINERJA SUB KEGIATAN		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit

D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada Tahun 2024, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*. Adapun untuk mendukung pelaksanaan kinerja diperlukan instrumen pendukung capaian kinerja berupa anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur pada

Tahun Anggaran 2024 mencakup 4 (Empat) Program yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan, sedangkan pada APBD Murni 2024 4 (Empat) Program yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan. Rincian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.7. Program dan Kegiatan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.655.223.723,00**	**3.969.793.001,00**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.957.557.763,00**	**3.107.557.763,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.557.763,00	3.107.557.763,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22.005.750,00**	**22.005.750,00**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.005.750,00	22.005.750,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**317.815.974,00**	**454.635.252,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.957.072,00	2.957.072,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.049.596,00	136.368.874,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.972.195,00	3.972.195,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.998.452,00	7.998.452,00
Penyediaan Bahan/Material	21.838.659,00	21.838.659,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	281.500.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0,00**	**0,00**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**264.844.236,00**	**292.594.236,00**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.700.000,00	111.450.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236,00	181.144.236,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	63.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**59.896.917,00**	**59.896.917,00**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**59.896.917,00**	**59.896.917,00**
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.997.672,00	4.997.672,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.899.245,00	54.899.245,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**0,00**	**0,00**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**0,00**	**0,00**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,00	0,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0,00	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**0,00**	**0,00**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**0,00**	**0,00**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**1.263.891.540,00**	**1.263.891.540,00**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**1.263.891.540,00**	**1.263.891.540,00**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.387.817,00	99.387.817,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.119.595.094,00	1.119.595.094,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.908.629,00	44.908.629,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**35.784.516,00**	**35.784.516,00**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**35.784.516,00**	**35.784.516,00**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.840.000,00	9.840.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.985.000,00	14.985.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.959.516,00	10.959.516,00
TOTAL ANGGARAN	**5.014.796.696**	**5.329.365.974**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja Pertama RPD 2024-2026 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) ,dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Kategori Predikat

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 terhadap target sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,45	0,36	80%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	92,13	102.4 %
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	75,00	72,10	96,13%

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bumi Makmur terdiri dari 2 (Dua) indikator, yaitu Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ada di Kecamatan.

a. Uraian Capaian Sasaran

1) Sasaran 1 Indikator 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik Indikator Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memainkan peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa telah memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. UU ini bertujuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa serta kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan Nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung tinggal di daerah pedesaan, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar sebagai upaya dalam menciptakan stabilitas Nasional. Selain itu, posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa.

Namun, dalam implementasinya, Desa masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Permasalahan Desa dapat merujuk pada beragam masalah, tantangan, dan isu yang dihadapi oleh wilayah pedesaan atau komunitas Desa. Berbagai permasalahan ini dapat sangat bervariasi dan bergantung pada faktor-faktor, seperti geografi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Permasalahan Utama di Desa

1. Infrastruktur yang Terbatas
    a. Masih banyak Desa yang menghadapi masalah terbatasnya infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.
    b. Kondisi infrastruktur yang buruk menghambat mobilitas masyarakat dan akses ke layanan publik.
2. Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai
    a. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Desa yang relatif rendah.
    b. Kurangnya tenaga ahli dan profesional yang mau berkarya di Desa.
    c. Kemampuan aparatur Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan masih terbatas.
3. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
    a. Sebagian besar masyarakat Desa masih hidup di bawah garis kemiskinan.
    b. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif, seperti lahan, modal, dan teknologi.
    c. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat Desa dan perkotaan masih cukup tinggi.
4. Degradasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam
    a. Kerusakan hutan, tanah, dan sumber daya air akibat eksploitasi yang berlebihan.
    b. Pencemaran lingkungan, seperti sampah dan limbah, yang belum tertangani dengan baik.

c. Dampak perubahan iklim yang memengaruhi sektor pertanian dan perikanan.

5. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

a. Kurangnya keterlibatan masyarakat Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Desa.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Adapun aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa antara lain:

1. Kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan);
2. Pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar);
3. Lingkungan; dan
4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara untuk tujuan pembangunan desa di antaranya:

1. Kesejahteraan masyarakat;
2. Kualitas hidup;
3. Penanggulangan kemiskinan,

Pada tahun 2024 SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan belum menetapkan indikator untuk pemenuhan Rasio Desa Mandiri dikarenakan pada penetapan awal sasaran masih memakai sasaran lama. Penetapan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik dengan indikator Rasio Desa Mandiri terhadap jumlah Desa yang ada di Kecamatan ini dipakai ketika sebelumnya telah dievaluasi. Adapun untuk Tahun 2024 ini Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan Bumi Makmur terealisasi dengan Nilai

0,36 dari Target Nilai 0,45 dengan Capaian 80%. Adapun cara menghitung Nilai Realisasi tersebut dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$Indeks\ Desa\ Mandiri = \frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri}{Jumlah\ Seluruh\ Desa\ di\ Kecamatan}$$

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat yang digunakan untuk mengukur status perkembangan desa di Indonesia. Dalam sistem ini, desa diklasifikasikan ke dalam lima kategori berdasarkan nilai indeks yang diperoleh dari tiga komponen utama: Ketahanan Sosial , Ketahanan Ekonomi , dan Ketahanan Lingkungan . Klasifikasi ini meliputi:

1. Desa Sangat Tertinggal Nilai IDM < 0,491
2. Desa Tertinggal Nilai IDM > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang Nilai IDM > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju Nilai IDM > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri Nilai IDM > 0,815

Perkembangan Indeks Desa Membangun Berdasarkan Peringkat / Ranking Kabupaten Tingkat Nasional

Tabel 3.3 Perkembangan Indeks Desa Membangun Berdasarkan Peringkat / Ranking Kabupaten Tingkat Nasional

TAHUN	RANGKING NASIONAL	KABUPATEN	NILAI IKE	NILAI IKL	NILAI IKS	NILAI IDM	STATUS IDM
2019	-	Tanah Laut	-	-	-	-	-
2020	-	Tanah Laut	-	-	-	-	-
2021	163	Tanah Laut	0,6191	0,6405	0,7917	0,6838	Berkembang
2022	172	Tanah Laut	0,6400	0,6718	0,8092	0,7070	Berkembang
2023	143	Tanah Laut	0,6724	0,7590	0,812	0,7478	Maju
2024	98	Tanah Laut	0,719	0,8400	0,8223	0,7938	Maju

Keterangan :

a) IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi
b) IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan
c) IKS : Indeks Ketahanan Sosial

Rekap Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 – 2024

Tabel 3.4 Rekap Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 – 2024

NO	Klasifikasi IDM	Jumlah Desa						
		2017/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangat Tertinggal	2	1	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	55	15	4	2	0	0	0
3	Berkembang	66	89	98	85	70	38	15
4	Maju	7	25	26	40	52	69	53
5	Mandiri	0	0	2	3	8	23	62
Jumlah		130	130	130	130	130	130	130

Desa di Kecamatan Bumi Makmur berjumlah 11 Desa dengan status IDM 4 Desa Mandiri, 5 Desa Maju dan 2 Desa masih Berkembang. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Rincian Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

NO	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112001	HANDIL BABIRIK	0.823	0.767	0.933	0.841	MANDIRI
2	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112002	KURAU UTARA	0.623	0.567	0.667	0.6854	BERKEMBANG
3	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112003	BUMIHARAPAN	0.771	0.767	0.933	0.8238	MANDIRI
4	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112004	SUNGAI RASAU	0.771	0.817	0.867	0.8183	MANDIRI
5	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112005	PANTAI HARAPAN	0.749	0.45	0.8	0.6662	BERKEMBANG
6	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112006	HANDIL SURUK	0.766	0.817	0.733	0.7719	MAJU
7	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112007	HANDIL GAYAM	0.634	0.783	0.933	0.8503	MANDIRI
8	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112008	HANDIL BIRAYANG ATAS	0.754	0.617	0.933	0.7681	MAJU
9	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112009	HANDIL BIRAYANG BAWAH	0.766	0.617	0.8	0.7275	MAJU
10	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112010	HANDIL MALUKA	0.72	0.683	0.867	0.7567	MAJU
11	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	6301112011	HANDIL LABUAN AMAS	0.714	0.7	0.8	0.7381	MAJU

Permasalahan Desa yang kompleks membutuhkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan Desa, di antaranya:

1. Peningkatan Infrastruktur Desa
    a. Memfasilitasi anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar di Desa.
    b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa

a. Memfasilitasi kualitas dan kapasitas aparatur Desa melalui pelatihan dan pendidikan.

b. Mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk mengembangkan SDM Desa.

3. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan

a. Memfasilitasi optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk program pengentasan kemiskinan.

b. Mendorong diversifikasi ekonomi Desa dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

a. Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

b. Melibatkan masyarakat Desa dalam upaya konservasi lingkungan dan sumber daya alam.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

a. Memperkuat sistem demokrasi Desa dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

b. Mendorong keterlibatan masyarakat Desa dalam setiap tahapan pembangunan.

Rencana Aksi dalam pembangunan Desa yang Mandiri dalam hal ini Kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai fasilitator pembangunan terhadap Desa-desa di wilayah kerja Kecamatan Bumi Makmur. Adapun Rencana aksi untuk pembangunan desa mandiri meliputi:

1. Memfasilitasi Pemetaan Masalah Di Desa
2. Memfasilitasi Peningkatan Infrastruktur Dasar
3. Memfasilitasi Peningkatan Kualitas SDM
4. Memfasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan
5. Memfasilitasi Peningkatan Kapabilitas Pemerintahan Desa
6. Memfasilitasi Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur
7. Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

8. Memfasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
9. Memfasilitasi Inovasi Teknologi

2) Sasaran 1 Indikator 2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2024 SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan telah menetapkan indikator kinerja tersebut, walaupun untuk indikator kinerja outcomenya belum maksimal dapat diukur tingkat capaiannya. Berikut ini data realisasi pelayanan publik kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 493 lembar kuisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi /Kemampuan Pelaksana Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan; dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah 92.13 dari target 90, dengan nilai capaian sebesar 102.4% berdasarkan Tabel 3.2. tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Memuaskan**. Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 3.6. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Bumi MakmurTahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,77	A
2.	Prosedur	3,78	A
3.	Waktu Penyelesaian	3,74	A
4.	Biaya / Tarif	4,00	A
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,74	A
6.	Kompetensi Pelayanan	3,60	A
7.	Perilaku Pelaksana	3,56	A
8.	Sarana dan prasarana	3,63	A
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,72	A

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata- rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (4,00) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Perilaku Pelaksana (3,56) dan Unsur Sarana dan Prasarana (3.63). Angka ini menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif, sedangkan pada Perilaku Pelaksana memberikan tingkat kepuasaan paling rendah.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Bumi Makmur menetapkan target nilai IKM sebesar 90, sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024 diperoleh realisasi nilai IKM 92.13 (Mutu Pelayanan Sangat Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan.

Kendala yang dihadapi Kecamatan Bumi Makmur dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah yakni unsur Perilaku Pelaksana dan Unsur Sarana dan Prasarana. Berdasarkan analisa hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi dan pelatihan serta rangkap tugas terhadap tenaga pelayanan sedangkan fasilitas sarana dan prasarana terkait teknologi masih kurang berfungsi maksimal dikarenakan terbatasnya media dan ketersediaan pemerataan teknologi jaringan internet pada wilayah kerja Kecamatan Bumi Makmur.

Adapun solusi yang di ambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengusulkan penambahan tenaga pelayanan yang secara khusus memahami kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan serta memberikan pembinaan dalam hal melaksakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk permasalahan sarana dan prasarana yaitu menambah dan meningkat kecepatan jaringan internet dikantor dan untuk wilayah kerja perlunya peningkatan koordinasi antara kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Kecamatan Bumi Makmur mencetuskan Sistem Informasi Cepat Terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK) pada Seksi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur.

Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggara pelayanan publik, maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan pekembangan zaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Bumi Makmur tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya diperlukan evaluasi dan perbaikan yang terus menerus agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

Tanda tangan adalah tanda yang merupakan identitas dari seseorang yang memiliki bentuk berupa tulisan tangan yang unik. Tanda tangan berfungsi untuk mengesahkan dokumen-dokumen penting, seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, dan dokumen lainnya. Tanda tangan merupakan salah satu bukti identitas orang tanda menyetujui keabsahan dokumen. Saat ini tanda tangan sudah mengikuti jamannya, tanda tangan awalnya hanya dituliskan pada dokumen pada kertas dengan tinta, tetapi saat ini tanda tangan mengikuti era digitalisasi 4.0 menjadi tanda tangan digital/online.

Tanda tangan digital memberikan nilai kemudahan pada masyarakat dikarenakan lebih cepat, mudah, efisien dan aman. Penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi keuangan terdapat dalam Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut

UU ITE).

Dalam upaya peningkatan pelayanan di Kecamtan Bumi Makmur melalui seksi pelayanan dengan mempercepat waktu pelayanan untuk pelayanan surat pengantar yang memerlukan pengesahan dari pimpinan SKPD dalam hal ini adalah Camat. Sehingga diperlukan pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien dengan tidak terhambat apabila Camat tidak berada ditempat, karena hal itu dapat tetap mendapatkan persetujan dengan menggunakan Aplikasi SI CANTIK yaitu berupa pelayanan cepat dari Kecamatan Bumi Makmur. Disini nantinya kepala SKPD dapat memberikan persetujuan dari jauh dan masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan serta menunggu lama. Aplikasi SI CANTIK (Sistem Informasi Cepat terlayani Aman Nyaman Tertib Inovatif dan Konsisten) sebagai sarana aplikasi yang dapat memberikan persetujuan surat pengantar pelayanan tanpa dibatasi ruang dan waktu sekaligus untuk mendokumentasikan data pemohon layanan dalam rangka pelaporan data pelayanan.

Berikut ini data realisasi pelayanan publik kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Tabel 3.7. Realisasi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	618
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	408
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	222
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	8
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	246
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	65
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu	116
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	0
9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	31
10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	6
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	-

12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	38
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)	47
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	45
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	26

Adapun rencana aksi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik untuk memperoleh kepuasan masyarakat yang optimal adalah sebagai berikut :

1. Memastikan terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan;
2. Memastikan standar pelayanan telah direviu dan perbaiki setiap triwulan;
3. Memastikan seluruh layanan melakukan sosialisasi/pelatihan terkait pelayanan prima;
4. Memastikan seluruh layanan menerapkan teknologi informasi;
5. Memastikan telah dilakukan tindaklanjut atas seluruh pengaduan untuk perbaikan layanan;
6. Memastikan evaluasi penanganan keluhan , masukan, kritik dan saran dilakukan setiap triwulan;
7. Memastikan Laporan Survei kepuasan disampaikan setiap triwulan;
8. Memastikan Inovasi Pelayanan tetap berjalan dengan baik;

3) Sasaran 2 Indikator 1: Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut SKPD Nomor 700.1.2.1/71/LHEAKIP-Irban III/Insp/2024 tanggal 01 April 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar

manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Renstra SKPD
b. Renja SKPD
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
d. Indikator Kinerja Utama (IKU
e. Cascading/Pohon Kinerja
f. Laporan Kinerja
g. Dokumen lain yang mendukung

2. Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur.
3. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kecamatan Bumi Makmur memperoleh nilai **72,10** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"** ditandai dengan terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajamen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / Koordinator.
4. Nilai sebagaimana diberikan tersebut merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi dilingkungan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Perencanaan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 21,60% dari bobot sebesar 30% dengan kategori BB (Sangat Baik)
   b. Pengukuran Kinerja, diperoleh nilai sebesar 21,00% dari bobot sebesar 30% dengan kategori BB (Sangat Baik)
   c. Pelaporan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 10,50 % dari bobot sebesar 15 % dengan kategori BB (Sangat Baik)
   d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diperoleh nilai sebesar 19,00% dari bobot sebesar 25% dengan kategori BB (Sangat Baik).
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana diatas, tim reviu SAKIP memberikan saran kepada Kecamatan Bumi Makmur untuk melakukan perbaikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dari segi komponen perencanaan kinerja terdapat catatan sebagai berikut

1) Penyusunan perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan
2) Pimpinan belum sepenuhnya terlibat dalam pencapaian kinerja
3) Masih terdapat perbedaan indikator kinerja pada tiap-tiap dokumen kinerja

b. Pengukuran Kinerja

Dari segi komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) namun belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran;
2) SKPD telah melakukan perubahan Renja, namun perubahan tersebut betum berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwutan);
3) Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang dijanjikan (PK) namun pada SKP feedback pimpinan terhadap hasil capaian kinerja belum menyajikan urnpan balik yang berkelanjutan;

c. Pelaporan Kinerja

Dari segi komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Belum dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang talah dlsusun. sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai;
2) laporan kinerja berkala telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja;

3) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
4) Dokumen kinerja belum sepenuhnya menggambarkan terkait proses pencapaian kinerja atas IKU SKPD ataupun analisis hanya menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi dengan penjelasan yang belum cukup memadai mengenai cara-cara ataupun hal--hal yang rnendukung pencapaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya, namun belurn sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dari hasil nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut yaitu dengan nilai yaitu sebesar **72,10** dengan kategori **BB (Sangat Baik)** dibandingkan dengan nilai tahun 2022 yaitu dengan nilai sebesar **53,20** kategori **CC (Cukup Memadai)** dalam hal ini mengalami peningkatan sebesar **18,9** poin.

Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur ini juga didukung dengan 3 indikator pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kinerja subbag perencanaan dan keuangan secara keseluruhan mampu terealisasi 100% dari masing – masing target pada indikator – indikator kinerjanya. Kegiatan yang dilakukan pada subbag perencanaan dan keuangan adalah penyusunan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi kinerja dan dokumen-dokumen laporan keuangan.

Dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2023 adalah Renstra Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Anggaran 2024, Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dokumen evaluasi kinerja yang disusun pada tahun 2024 adalah

Laporan Kinerja Tahun 2024, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)/Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023, Laporan Kinerja Bulanan Tahun 2024, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 per triwulan dan Laporan Risk Register/Manajemen Resiko Tahun 2024.

Dokumen laporan keuangan yang disusun pada tahun 2024 adalah Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan CALK.

Rencana aksi untuk meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Bumi Makmur secara umum dapat dilakukan dengan menindak lanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana diatas, tim reviu SAKIP memberikan saran kepada Kecamatan Bumi Makmur untuk melakukan perbaikan yang telah ditetapkan. Rencana aksi ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Adapun rencana aksi yang yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP kecamatan, antara lain :

1) Menyusun perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan ;
2) Pimpinan akan sepenuhnya terlibat dalam pencapaian kinerja ;
3) Memperbaiki perbedaan indikator kinerja pada tiap-tiap dokumen kinerja
4) Pengukuran kinerja yang telah dilakukan secara berkala (triwulan) akan sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran;
5) Dalam hal melakukan perubahan Renja, perubahan tersebut akan disesuaikan sesuai hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwutan);
6) Pimpinan akan menyajikan feedback setiap pegawai yang telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang dijanjikan (PK yang berkelanjutan);
7) Akan melakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang telah dlsusun. sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai;
8) laporan kinerja berkala telah disusun, akan sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja;

9) Laporan kinerja telah disusun, akan sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

10) Dokumen kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan terkait proses pencapaian kinerja atas IKU SKPD ataupun analisis yang hanya menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi dengan penjelasan yang belum cukup memadai mengenai cara-cara ataupun hal--hal yang rnendukung pencapaian kinerja akan diperbaiki.

b. Realisasi Capaian Sasaran Strategis

1) Sasaran 1 Indikator 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik Indikator Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan

Pencapaian Sasaran Strategis terhadap terhadap target dan realisasi pada sasaran 1 indikator 1 Tahun 2024 di Kecamatan Bumi Makmur ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 54.899.245,- dan realisasinya sebesar Rp. 52.987.820,- dengan tingkat capaian target 96,52%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

b) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  Sub Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pagu anggaran Rp. 99.387.817,- dan realisasinya sebesar Rp. 93.741.950,- dengan tingkat capaian target 94,32%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional, dengan pagu anggaran Rp. 1.119.595.094,- dan realisasinya sebesar Rp. 882.580.000,- dengan tingkat capaian target 78,83%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 83,33% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target

yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 44.908.629,- dan realisasinya sebesar Rp. 35.185.000,- dengan tingkat capaian target 78,35%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 66,67% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

c) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran Rp. 9.840.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 9.840.000,- dengan tingkat capaian target 90,91%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan pagu anggaran Rp. 14.985.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 13.320.000,- dengan tingkat capaian target 88,89%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa,

dengan pagu anggaran Rp. 10.959.516,- dan realisasinya sebesar Rp. 10.125.000,- dengan tingkat capaian target 92,39%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

2) **Sasaran 1 Indikator 2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

Pencapaian Sasaran Strategis terhadap terhadap target dan realisasi pada sasaran 1 indikator 1 Tahun 2024 di Kecamatan Bumi Makmur ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran Rp. 4.997.672,- dan realisasinya sebesar Rp. 4.651.200,- dengan tingkat capaian target 93,07%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

3) **Sasaran 2 Indikator 1: Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur**

Pencapaian Sasaran Strategis terhadap terhadap target dan realisasi pada sasaran 1 indikator 1 Tahun 2024 di Kecamatan Bumi Makmur ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

TANAH LAUT

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Terlaksananya Belanja Pegawai berupa gaji pokok dan tambahan penghasilan, dengan pagu anggaran Rp. 3.107.557.763,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.781.583.834,- dengan tingkat capaian target 89,51 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian
- Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan pagu anggaran Rp. 22.005.750,- dan realisasinya sebesar Rp. 16.110.000,- dengan tingkat capaian target 73,21 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 2.957.072,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.915.686,- dengan tingkat capaian target 98,60%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 136.368.874,- dan

realisasinya sebesar Rp. 128.909.624,- dengan tingkat capaian target 94,53 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran Rp. 3.972.195,- dan realisasinya sebesar Rp 3.367.000,- dengan tingkat capaian target 84,76%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu anggaran Rp. 7.998.452,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.363.000,- dengan tingkat capaian target 67,05 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Bahan/Material, dengan pagu anggaran Rp. 21.838.659,- dan realisasinya sebesar Rp. 21.095.000,- dengan tingkat capaian target 96,59 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 281.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 279.412.192,- dengan

tingkat capaian target 99,26 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

  Sub Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp. 111.450.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 35.601.617,- dengan tingkat capaian target 31,94%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 181.144.236,- dan realisasinya sebesar Rp. 141.375.629,- dengan tingkat capaian target 78,05%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 29.962.800,- dengan tingkat capaian target 99,88%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang

dilaksanakan

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

  Sub kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp. 63.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 61.450.724,- dengan tingkat capaian target 97,54%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-1 RPJMD telah mencapai 100% dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2. Analisa Capaian Sasaran Strategis

Dari penjelasan pencapaian Sasaran Strategis diatas maka dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian sasaran strategis SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 ini sudah hampir tercapai dilihat dari persentase capaian di setiap Indikator sasaran dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan capaian sasaran kinerja utama Camat :

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi IKU Camat Tahun 2024 dan Realisasi IKU Camat 3 Tahun Sebelumnya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	-	-	-	0,45	0,36	80%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,63	89.86	90,2	90	92,13	102%
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	BB	53,20 (CC)	72,10 (BB)	75 (BB)	72,10 (BB)	96,13%

Adapun Program dan kegiatan yang ada di SKPD Kecamatan Bumi Makmur sifatnya mendukung tujuan yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu .Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target sasaran antara lain :

1. Adanya keaktifan dari Aparat Pemerintah Kecamatan atau Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2024.
2. Keaktifan Aparat Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan, yang memerlukan peran aktif dari Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
3. Ketersediaan dana yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menunjang program dan kegiatan Kecamatan untuk mencapai tujuan, walaupun masih belum optimal.

SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Adapun solusi yang dapat ditempuh Diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, pengisian pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) sembari menunggu dilantiknya pejabat definitif, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas.

3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sumber daya memainkan peranan penting dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja organisasi. Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana. Secara organisasi, dilihat dari sumber daya manusia, Kecamatan Bumi Makmur masih belum ideal. Sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan adanya penyediaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi walaupun tidak bisa maksimal karena kewenangan tugas pokok dan fungsi PTT terbatas. Selain itu juga, Camat meminta peningkatan disiplin dan kinerja dari para Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Bumi Makmur sehingga dapat menuntaskan tujuan dan sasaran organisasi.

Dilihat dari sumber daya keuangan, pada dasarnya berapa pun dana yang diterima akan dikelola secara efektif dan efisien, artinya dalam

penggunaan anggaran memenuhi azas sesuai kebutuhan/keperluan riil dan harga yang berlaku di pasaran. Terlihat dari beberapa pekerjaan secara fisik terlaksana 100% akan tetapi anggarannya terserap sekitar 70 % hingga 90% artinya dana yang tersisa kembali ke kas daerah dan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan anggaran pada tahun selanjutnya. Secara integritas dan komitmen, seluruh PPTK telah ditekankan untuk menggunakan anggaran sesuai kebutuhan riil. Menurut sumber daya sarana dan prasarana, memang saat ini beberapa kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah tersedia atau terlaksana. Akan tetapi ada beberapa unit sarana dan prasarana yang sudah tidak layak dan ada juga yang masih belum terpenuhi. Hal ini mengingat prioritas penggunaan anggaran yang menjadi tolak ukur sehingga ada beberapa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus segera dipenuhi, sedangkan yang belum bisa terpenuhi menunggu peluang untuk direalisasikan. Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah masing-masing ASN diminta oleh Camat untuk melakukan inovasi sembari menunggu terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana secara bertahap.

4. Analisis Efisiensi Kinerja Camat

Secara umum rata-rata pencapaian efesiensi kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai RPJMD Tahun 2024-2026 yang terdiri atas 2 (Dua) sasaran dalam tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan walaupun ada 2 (dua) sasaran yang tidak tercapai 100%, untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Tingkat Efesiensi Kinerja Camat

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Nilai	0,45	0,36	**80,00%**	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.263.891.540	1.011.506.950	80,03%
								2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.784.516	33.285.000	93,02%
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	90,13	**102,00%**	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.896.917	57.639.020	96,23%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	1	Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	75	72,10	**96,00%**	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.969.793.001	3.507.147.106	88,35%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR					**92,67%**	**TOTAL PER SASARAN**		**5.329.365.974**	**4.609.578.076**	**86,49%**
TINGKAT EFISIENSI 6,18 %												

5. Eselon III.b (Sekretaris Camat)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Camat Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Tabel Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Camat

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai Komponen Perencanaan	22	Nilai	21,60	98%
		Nilai Komponen Pengukuran	22	Nilai	21,00	95%
		Nilai Komponen Pelaporan	11	Nilai	10,50	95%
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	Nilai	19	95%
		Hasil Survey Pelayanan Kesektariatan	90	Nilai	90,88	101%

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kecamatan Bumi Makmur memperoleh nilai **72,10** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"** ditandai dengan terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajamen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / Koordinator. Nilai sebagaimana diberikan tersebut merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi dilingkungan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 21,60% dari bobot sebesar 30% dengan kategori BB (Sangat Baik);
b. Pengukuran Kinerja, diperoleh nilai sebesar 21,00% dari bobot sebesar 30% dengan kategori BB (Sangat Baik);
c. Pelaporan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 10,50 % dari bobot sebesar 15 % dengan kategori BB (Sangat Baik);
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diperoleh nilai sebesar 19,00% dari bobot sebesar 25% dengan kategori BB (Sangat Baik).

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Tabel Perbandingan Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
			2023	2024
1	Perencaanaan Kinerja	30	18,60	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30	16,80	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	4,80	10,50
4	Evaluasi Internal	25	13,00	19
5	Nilai Hasil Evaluasi		**53,20**	**72,10**
6	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**BB**

Secara umum pada tahun 2024 Nilai realisasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 walaupun belum sepenuhnya memenuhi target yang sudah ditentukan pada tahun 2024.

1) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat

Dalam menjalankan kegiatan pada Sekretariat di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 orang Sekretaris (Pejabat Pengawas) dan 2 orang Kasubag, 1 orang Bendahara dan 3 orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan dibawah kendali Sekretariat.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai sasaran meningkatkan seluruh sasaran strategis Kasi Tata Pemerintahan kantor Kecamatan Bumi Makmur didukung oleh Program/Kegiatan penunjang dengan dengan pagu anggaran Rp. 3.969.793.001,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.507.147.106,- dengan tingkat capaian target 88,35% dan Efesiensi 5,17%. dari pagu yang ditetapkan,untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.12 Tabel Realisasi Keuangan Sekretariat

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.655.223.723,00**	**3.969.793.001,00**	3.507.147.106,00	88,35%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.957.557.763,00**	**3.107.557.763,00**	2.781.583.834,00	89,51%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.557.763,00	3.107.557.763,00	2.781.583.834,00	89,51%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22.005.750,00**	**22.005.750,00**	16.110.000,00	73,21%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.005.750,00	22.005.750,00	16.110.000,00	73,21%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**317.815.974,00**	**454.635.252,00**	441.062.502,00	97,01%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.957.072,00	2.957.072,00	2.915.686,00	98,60%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.049.596,00	136.368.874,00	128.909.624,00	94,53%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.972.195,00	3.972.195,00	3.367.000,00	84,76%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.998.452,00	7.998.452,00	5.363.000,00	67,05%
Penyediaan Bahan/Material	21.838.659,00	21.838.659,00	21.095.000,00	96,59%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	281.500.000,00	279.412.192,00	99,26%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**264.844.236,00**	**292.594.236,00**	176.977.246,00	60,49%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.700.000,00	111.450.000,00	35.601.617,00	31,94%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236,00	181.144.236,00	141.375.629,00	78,05%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	91.413.524,00	98,29%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.962.800,00	99,88%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	63.000.000,00	61.450.724,00	97,54%
Total Realisasi			3.507.147.106,00	88,35%

3.13 Tabel Realisasi Kinerja Sekretaris Kecamatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian	Persentase Keuangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai Komponen Perencanaan	22	Nilai	21,60	98%	88,35%
		Nilai Komponen Pengukuran	22	Nilai	21,00	95%	
		Nilai Komponen Pelaporan	11	Nilai	10,50	95%	
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	Nilai	19	95%	
		Hasil Survey Pelayanan Kesektariatan	90	Nilai	90,88	101%	
Rata - Rata Capaian						**97%**	

Tabel 3.14 Tabel Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasi Pemerintahan Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA 2024	PENYERAPAN ANGGARAN 2024	TINGKAT EFESIENSI
97,00%	**88,35%**	**8,65%**

3) Kendala / Permasalahan yang dihadapi pada Sekretariat

1. Kurangnya tenaga ASN yang kompeten menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis;
2. Kurangnya tenaga ASN pada Jabatan Penyusun Anggaran dan Pelaporan dan Pengelola Teknologi Informasi;
3. Kurangnya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf untuk penyusunan Perencanaan, evaluasi dan monitoring, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD;
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung kinerja di Sekretariat

4) Solusi dan Rencana Aksi Permasalahan yang dihadapi pada Sekretariat

1. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang kompeten menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Bati-bati sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran;
2. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Bumi Makmur dalam rangka penyusunan Perencanaan, evaluasi dan monitoring dan penyusunan renstra;
3. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan;

6. Eselon IV (Kepala Sub Bagian / Seksi)

Kecamatan Bumi Makmur sampai saat ini sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 yang terdiri atas 4 (Empat) Program yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.329.365.974 ,- dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar **96,22%** dan serapan anggaran mencapai **86,49 %** yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala Seksi dan sub bagian lingkup kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tabel 3.15. Tabel Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang	15 Orang	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
5	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	50 Orang	50 Orang	100%

Pelaksanaan sasaran strategis pada indikator kinerja 1 sampai dengan 5 tahun 2024 pada indikator tersebut diatas dari target masing-masing dari target 100% dapat terealisasi 100% artinya kegiatan dari beberapa indikator

tersebut dapat terpenuhi palaksanaan sesuai dengan rencana kerja.

Pelaksanaan kegiatan dari sasaran strategis 1 sampai dengan 5 tahun 2024 dalam pelaksanaan implementasinya pada indikator tersebut diatas tahun 2024 tidak ada perbedaan pada pencapaian target dan realisasi dengan capaian persentase yang sama.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada posisi staf bukan menjadi tantangan, juga terkait anggaran kegiatan dan sarana prasarana yang sangat minim namun dengan keterbatasan tersebut kegiatan diatas dapat dilaksanakan sesuai kemampuan dalam mewujudkan kinerja pada seksi pemerintahan.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Bumi Makmur dapat mewujudkan realisasi 100% Dalam memfasilitasi administrasi pemerintahan desa dan BPD di koordinasikan dan dilakukan kerjasama dengan instasi terkait. Kegiatan Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Bumi Makmur meliputi penyusunan perundangan undangan di desa dan pembinaan administrasi desa dan tugas pokok desa

Pelaksanaan fasilitasi kemempimpinan yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan yaitu kegiatan dalam acara HUT RI ke 78 di halaman Kantor Kecamatan Bumi Makmur.

Kegiatan-kegiatan Kasi Pemerintahan Tahun 2024 dalam pencapaian target indikator antara lain sebagai berikut :

a) Memfasilitasi Penjaringan dan penjaringan serta mutasi perangkat desa sebanyak 11 desa.

b) Kegiatan pembuatan laporan informasi kependudukan yang di dukung dari data untuk 11 (sebelas) desa dapat dengan lancar pelaksanaannya. Untuk laporan informasi kependudukan, desa melaporkan setiap bulan kepada Kecamatan sehingga informasi kependudukan setiap bulannya diperbaharui.

c) Monitoring pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota / Kabupaten, DPD dan Kepala Daerah Tahun 2024

d) Pelaksanaan fasilitasi kemempimpinan yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan yaitu kegiatan dalam acara HUT RI ke 77 di halaman Kantor

Kecamatan Bumi Makmur.

Fasilitasi pembinaan dan penyusunan informasi kependudukan juga terlaksana pada 11 (sebelas) desa berupa terwujudnya laporan informasi kependudukan tahun 2024 salah satunya berupa data jumlah penduduk se kecamatan Bumi Makmur baik yang lain yang pindah yang masuk ke wilayah Bumi makmur dan yang meninggal.

Gambar 1 Sosialisasi dan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Gambar 2 Fasilitasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Daerah

Pada bulan Agustus tahun 2024 juga di peringati HUT Kemerdekaan RI ke 78 juga dilaksanakan dengan melibatkan instasi se kecamatan Bumi Makmur dan kepala desa di halaman Kantor Kecamatan Bumi Makmur pada foto dibawah ini .

Gambar 3 Pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945

1) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Tata pemerintahan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Tapem (Pejabat Pengawas) dan 1 orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan dibawah kendali seksi pemerintahan dengan melakukan tingkat koordinasi dengan Forkompincam, instansi vertikal lainnya yang

mengikutsertakan Kecamatan Bumi Makmur dalam setiap event kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada KasiTapem yaitu merekapitulasi data jumlah penduduk, fasilitasi pemilihan kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), fasilitasi pemilihan umum legislatif, Pemilihan Presiden, Pemeliharaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten, serta penyusunan LPPD Desa.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai sasaran meningkatkan seluruh sasaran strategis Kasi Tata Pemerintahan kantor Kecamatan Bumi Makmur didukung oleh Program/Kegiatan penunjang dengan dengan pagu anggaran Rp. 109.227.817,- dan realisasinya sebesar Rp. 103.581.950,- dengan tingkat capaian target 94,83% dan Efesiensi 5,17%. dari pagu yang ditetapkan,untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.16 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Pemerintahan Tahun 2024

N0	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024
1	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1045, Pelestarian Bhinneka Tunngal ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.387.817	93.741.950	94,32%

2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.840.000	9.840.000	100,00%
TOTAL				**109.227.817**	**103.581.950**	**94,83%**

Tabel 3.17 Tabel Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasi Pemerintahan Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA 2024	PENYERAPAN ANGGARAN 2024	TINGKAT EFESIENSI
100,00%	**94,83%**	**5,17%**

3) Kendala / Permasalahan yang dihadapi pada Tata Pemerintahan

5. Kurangnya kesadaran untuk inovasi dari SDM Aparatur Desa dalam Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa.
6. Kurangnya data informasi aparatur Desa secara lengkap.
7. Kurang memahami aparat desa dalam hal penyampaian laporan data kependudukan.
8. Pemilihan anggota paskibraka untuk para pelajar terpusat pada satu sekolahan saja pada hal sekolahan lainnya dengan diadakan seleksi masih banyak yang memenuhi syarat

4) Solusi / Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Tata Pemerintahan

4. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
5. Melakukan pendataan secara lengkap bagi Aparatur Pemerintah Desa.
6. Melakukan fasiltasi pembinaan secara berkelanjutan oleh BPMD Kabupaten Tanah Laut kepada aparat desa dalam penyusunan laporan kependudukan
7. Pengambilan anggota Paskibraka dari sekolahan tidak hanya terpusat dari satu sekolah.

5) Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Seksi Tata Pemerintahan

1. Melakukan pembinaan kepada seluruh Desa tentang Pentingnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan

pentingnya inovasi dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

2. Melakukan pendataan secara lengkap terhadap aparatur Desa.
3. Melakukan pendampingan kepada aparat desa secara berkala dalam penyusunan laporan kependudukan yang difasiltasi oleh DPMD Kabuparten Tanah Laut dengan melibat admin melalui aplikasi propofil desa dan kelurahan
4. Pemilihan anggota Paskibraka akan dilakukan seleksi dari beberapa sekolahan yang memenuhi pesyaratan dengan ostur badan dan intelektual yang memadai.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 3.18 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2024.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Layanan terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%

4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
6	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Laporan	11 Laporan	100%
Rata - rata Capaian Kinerja Tahun 2024					**100%**

Tahun 2024 Fasilitasi Pembinaan, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan tiga jenis Kegiatan yaitu Sosialisasi UKM bagi Pelaku UKM di Desa, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Ibu Rumah Tangga (PKK) dalam rangka pemasaran hasil produksi. berupa pebuatan telur asin, kerupuk udang dan haruan, peternakan itik, sasirangan yang sampai sekarang masih berjalan.

Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa dilaksanakan pada 11 (sebelas) desa. Kegiatan monografi kecamatan dan profil desa di bawah koordinasi Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan profil desa berjalan dengan baik.

Gambar 4 Fasilitasi Hasil Produksi dari UMKM Masyarakat

Penyusunan profil desa terkait kondisi geografis melalui bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat Kecamatan , pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam upaya terttib admnistrasi berupa pembuatan laporan pertangungan jawaban keuangan desa melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

Gambar 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024

Gambar 5 Fasilitasi dan Pembinaan Musyawarah Desa

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 11 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Bumi Makmur dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu Kegiatan dalam Pengelolaan Administrasi dan Perencanaan Keuangan Desa. Yaitu dengan memfasilitasi Evaluasi Rancangan APBDES, sekaligus dalam upaya Pembinaan, Pengawasan dan Penataan administrasi Keuangan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Evaluasi Rencana Anggaran (dilaksanakan Bulan Desember sebelun Tahun Anggaran dalam bentuk rancangan APBDES)
2) Evaluasi Perubahan Anggaran (dilaksanakan di triwulan 3 dan 4 ditahun anggaran tersebut)
3) Pembinaan Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan Setiap Triwulan di Tahun Anggaran Tersebut)

Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang mencakup kegiatan Musrenbang yang pada tahun 2024 dilaksanakan secara efektif di Kecamatan Bumi Makmur.

1) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi PMD di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Kasi PMD (Pejabat Pengawas) dan 1 (satu) orang Analis Data dan Informasi dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi PMD yaitu melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya, melakukan melakukan penyusunan profil desa, Pelaksanaan Evaluasi APBDes, Evaluasi APBDes perubahan, melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya. melakukan kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan),

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Kegiatan pelaksanaan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024 terdiri atas 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan, didukung oleh Program/Kegiatan penunjang dengan dengan pagu anggaran Rp. 80.843.761,- dan realisasinya sebesar Rp. 76.432.820,- dengan tingkat capaian target 94,54% dan Efesiensi 7,40%. dari pagu yang ditetapkan,untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.19 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.899.245	52.987.820	96,52%

2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.985.000	13.320.000	88,89%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.959.516	10.125.000	92,39%
TOTAL				**80.843.761**	**76.432.820**	**94,54%**

Tabel 3.20 Tabel Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA 2024	PENYERAPAN ANGGARAN 2024	TINGKAT EFESIENSI
100,00%	**92,60%**	**7,40%**

3) Kendala / Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Ketersediaan bahan baku dan permodalan yang dimiliki masyarakat dalam memproduksi hasil produk yang akan dipasarkan sesuai komoditas yang desa yang di produk oleh masyarakat desa
2. Penyusunan profil desa belum dilaksanakan secara optimal oleh desa
3. Kurangnya memahami aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam sistem adminstrasi berupa pengamprahan keuangan desa dan kelengkapan pelaporan pertanggungjawaban kegiatannya.
4. Kurangnya pemahaman aparat desa dalam hal pemilahan usulan kegiatan yang akan diusulkan atas kegiatan berupa fisik, infrastruktur yang tidak relevan usulan tersebut.
5. Tahun 2024 kegiatan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam hal ini pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan di Kecamatan Bumi Makmur.

4) Solusi atas kendala permasalahan yang dihadapi pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Melakukan disversifikasi pengolahan produk lain yang akan dihasilkan oleh masyarakat desa serta melakukan kemitraan dengan kelembagaan keuangan dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa dan per Bank kan lainya dalam hal mendukung permodalan agar keberadaan produk dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Perlu adanya sosialisasi, motivasi bagi aparat desa dalam hal pembuatan profil desa
3. Perlu adanya pembimbingan aparat desa secara berkelanjutan oleh pihak Kecamatan dan BPMD Kabupaten terutama Sekdes, Bendahara dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi usulan kegiatan masyarakat berupa fisik dan infrastruktur lainnya yang dituangkan dalam rencana kerja desa diharapkan aparat desa untuk dapat berkoordinasi dulu dengan satuan kerja perangkat daerah yang akan mengampu usulan kegiatan hasil Musrenbang desa dan Kecamatan.

5) Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Melakukan pembinaan dan peningkatan wawasan kepada pengrajin UKM di desa dalam upaya menjaga kestabilan produk yang dihasilkan secara terus menerus oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hai ini oleh Disnakerin Kabupaten.
2. Fasilitasi pendampingan penyusunan profil desa perlu diupayakan secara berkesinambungan oleh BPMD Kabupaten, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa masih rendah.
3. Perlu adanya fasilitasi bimbingan kepada aparat desa secara berkesinambungan dalam pengelolaan keuangan desa dan sisten pertanggungjawabannya minimal 3 (tiga) kali dalam setahun dan perlunya untuk menganggarkan kegiatan belanja pelatihan terhadap pengelolaan keuangan desa dan inventarisasi asset desa.
4. Perlu upaya untuk dilaksanakan lebih awal oleh aparat desa atas skala perioritas usulan program dan kegiatan desa untuk dapat diverikasi lebih

awal sebelum ditetapkan dalam usulan hasil rencana kerja pembangunan desa sebelum dilaksanakannya forum Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

c. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Tabel 3.21 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	8 Jenis	8 Jenis	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2024					**100,00%**

Pada sasaran strategis 1 Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat indikator Persentase PPKS yang Terfasilitasi dengan realisasi 100% merupakan bentuk dari kinerja dari Kasi Kemasyarakatan dalam memfasilitasi setiap bantuan Sosial terhadap masyarakat kurang mampu oleh pihak terkait di Kecamatan Bumi Makmur. Kinerja kelompok organisasi masyarakat tahun 2024 di Kecamatan Bumi Makmur berupa pelaksanaan kegiatan hibah dan kegiatan kegiatan berupa MTQ dan Safari Ramadhan. Kegiatan buka puasa bersama / Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan Bumi Makmur pada tahun 2024 terlaksana dengan baik.

Gambar 6 Pelaksanaan Safari Ramadhan

Gambar 7 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan di Kecamatan Jorong

Gambar 8 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Gambar 9 Pelaksanan Kegiatan Hibah di Desa

Sedangkan fasilitasi bantuan sosial dari target 8 jenis bantuan terlaksana 100% dengan jumlah 1353 KK yang menerima bantuan.

1) **Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi kemasyarakatan.**

Dalam menjalankan kegiatan, Seksi Kemasyarakatan di Kecamatan Bumi Makmur dibantu dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Kemasyarakatan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (jabatan pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kemasyarakatan yaitu melakukan kegiatan fasilitasi kafilah Kec. Makmur imengikuti kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2024 di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, kegiatan Buka Puasa bersama Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta masyarakat pada bulan ramadhan Tahun 1444 H, Sosialisasi Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam menjalankan kegiatannya, seksi Kemasyarakatan ditunjang dengan 1 (satu) program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 1.119.595.094,-. Capaian realisasi anggaran seksi kemasyarakatan mencapai 78,83% atau Rp. 882.580.000,-

Tabel 3.22 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Kemasyarakatan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024
1	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaran urusan pemerimtahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewuudkan stabiltas keamanan lokal. Regional dan Nasional	1.119.595.094	882.580.000	78,83%
TOTAL				**1.119.595.094**	**882.580.000**	**78,83%**

Tabel 3.23 Tabel Efesiensi Program, Kegiatan,Sub Kegiatan Tahun 2024 Kasi Kemasyarakatan

CAPAIAN KINERJA 2024	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
83,33%	**78,83%**	**4,50%**

3) Kendala / Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Kemasyarakatan

1. Belum tertib dan kurang memahaminya organisasi kemasyarakat dalam membuat proposal dan laporan pengajuan dalam hal permohonan kegiatan

kemasyarakatan , keagamaan dan bantuan sosial serta pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakannya.

2. Pihak organisasi yang ada didesanya berharap besar kepada pihak Kecamatan dalam hal ini bagian Kemasyarakatan untuk membuat laporan pertangungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Calon penerima hibah atau organisasi penerima tidak memahami sistem penggunaan dan akhir pembuatan pelaporan dana hibah
4. Tidak adanya koordinasi lebih awal dengan pihak pemberi hibah dengan pihak Kecamatan pada saat penyaluran hibah kepada calon penerima hibah

4) Solusi atas kendala permasalahan yang dihadapi pada Seksi Kemasyarakatan

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat., organisasi calon penerima hibah terkait tata cara pembuatan proposal dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

5) Rencana Aksi Yang akan dilakukan

1. Melakukan penyusunan draft pada tahap pengajuan dan verifikasi proposal yang disampaikan calon penerima hibah.
2. Melakukan penyesuaian standar harga yang dibuat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut sehingga diharapkan Rencana Anggaran Biaya memakai stnadar harga Pemerintah Daeerah dengan bimbingan teknis Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Bumi Makmur.
3. Sebelum pelaksanaan hibah dilakukan Pihak Kecamatan berkewajiban untuk mengajukan telaahan staf ke Bupati Tanah Laut terkait pengajuan hibah dari Kecamatan.

d. Kepala Seksi Pelayanan

Tabel 3.24. Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2024					**100,00%**

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur, salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai rencana strategis yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018 s/d 2024, dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun 2024 memperoleh IKM sebesar 3,61 (92,13) dengan mutu pelayanan berkategori sangat baik.

Adapun jenis pelayanan pada kantor kecamatan Bumi Makmur yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA
4. Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah
5. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran

6. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa
8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
11. Pelayanan Pengajuan Subsidi Listrik PLN
12. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha
13. Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)
14. Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)

B. Pelayanan Perizinan

1. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah
2. Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Kecamatan Bumi Makmur telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di kantor Kecamatan Bumi Makmur. JumlahPelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 14 jenis pelayanan non perizinan dan 2 pelayanan perizinan dengan jumlah sebanyak 16 pelayanan yang telah memenuhi target indikator tahun 2024 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi, pelayanan administrasi kependudukan dan legalisasi surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.25 sebagai berikut:

Tabel 3.25 Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	515	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	416	Seksi Kemasyarakatan

3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	174	Seksi Tapem
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	60	Seksi Tapem
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	214	Seksi Tapem
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	43	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	191	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	5	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	28	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	14	Seksi Kemasyarakatan
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	-	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	17	Seksi Pelayanan
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)	47	Seksi Kemasyarakatan
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	3	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	24	Seksi Kemasyarakatan
16	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	Kasi PMD

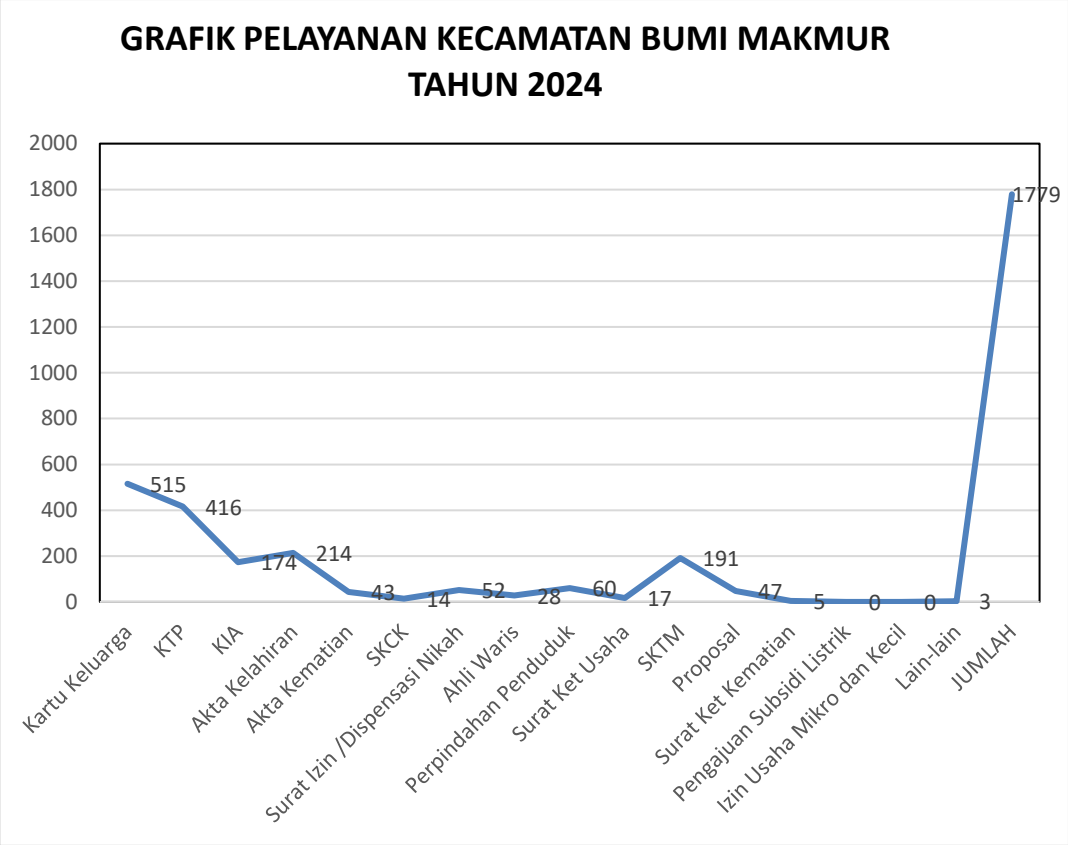

Grafik 1. Grafik Data Pelayanan Tahun 2024

Berdasarkan pada Tabel dan Gambar diatas, Pelayanan Kepengurusan Kartu Keluarga mempunyai capaian paling banyak yaitu 515 berkas untuk Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil dan Pengaduan Subsidi Listrik tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 535 lembar kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah 92,13 dan termasuk kategori **Sangat Baik** serta berada dalam mutu pelayanan **A**.

Dan untuk sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, Kecamatan Bumi Makmur sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Seksi dan Sub Bagian yang ada di SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Untuk mengetahui tingkat layanan yang ada di Kecamatan dengan menggunakan 9 indikator yang dipertanyakan dalam mengisian kuisioner yang diberikan kepada masyarakat yang sedang meminta pelayanan ke Kantor Kecamatan Bumi Makmur 9 indikator meliputi beberapa pertanyaan yang antara lain adalah :

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
2. Bagimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan diunit ini
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalammemberikan Pelayanan
4. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam Pelayanan
5. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam Pelayanan
7. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,13 dari 535 responden yang mengisi kuisioner.

Berikut Dokumentasi Pengisian lembar kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat :

Gambar 10. Dokumentasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur

Pada Tahun 2024 Laporan IKM terbagi menjadi per Triwulan atau 4 kali dalam satu tahun, Berikut Hasil Pengolahan Data Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Menjadi Laporan IKM :

Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

A. Tabel 3.15 IKM Triwulan I

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unsur	448	449	439	492	446	436	438	424	439	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisioner yg Terisi	3.64	3.65	3.57	4.00	3.63	3.54	3.56	3.45	3.57	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0, 11	0.40	0.40	0.39	0.44	0.40	0.39	0.39	0.38	0.39	**3.59**
IKM Per unsur	10.02	10.04	9.82	11.00	9.97	9.75	9.79	9.48	9.82	
IKM Unit Pelayanan										**89.68**

- U1 s.d. U 9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 186
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,11

U1	Persyaratan pelayanan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya / Tarif pelayanan
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan

IKM UNIT PELAYANAN : 89.68

Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

B. Tabel 3.16 IKM Triwulan II

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unsur	524	525	514	548	523	501	483	496	506	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisioner yg Terisi	3,82	3,83	3,75	4,00	3,82	3,66	3,53	3,62	3,69	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0, 11	0,42	0,42	0,41	0,44	0,42	0,40	0,39	0,40	0,41	**3,71**
IKM Per unsur	10,52	10,54	10,32	11,00	10,50	10,06	9,70	9,96	10,16	
IKM Unit Pelayanan										**92,74**

- U1 s.d. U 9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 186
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,11

U1	Persyaratan pelayanan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya / Tarif pelayanan
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan

IKM UNIT PELAYANAN : 92,74

Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

C. Tabel 3.17 IKM Triwulan III

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unsur	545	548	550	580	544	527	517	525	530	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisioner yg Terisi	3.76	3.78	3.79	4.00	3.75	3.63	3.57	3.62	3.66	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0, 11	0.41	0.42	0.42	0.44	0.41	0.40	0.39	0.40	0.40	**3.69**
IKM Per unsur	10.34	10.39	10.43	11.00	10.32	9.99	9.81	9.96	10.05	
IKM Unit Pelayanan										**92.29**

Page 4

- U1 s.d. U 9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 186
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,11

U1	Persyaratan pelayanan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya / Tarif pelayanan
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masuka

IKM UNIT PELAYANAN : 92.29

Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

D. Tabel 3.18 IKM Triwulan IV

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unsur	339	341	340	352	331	313	316	338	348	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisioner yg Terisi	3.85	3.88	3.86	4.00	3.76	3.56	3.59	3.84	3.95	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0, 11	0.42	0.43	0.43	0.44	0.41	0.39	0.40	0.42	0.44	**3.77**
IKM Per unsur	10.59	10.66	10.63	11.00	10.34	9.78	9.88	10.56	10.88	
IKM Unit Pelayanan										**94.31**

Page 3

- U1 s.d. U 9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 186
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,11

U1	Persyaratan pelayanan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya / Tarif pelayanan
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masuka

IKM UNIT PELAYANAN : 94.31

Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Berdasarkan tabel diatas, Hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 adalah 92,13 dengan Jumlah Responden 535 orang berpredikat A (Sangat Baik):

1) Analisis Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pelayanan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang yaitu 1 orang Kasi pelayanan (Pejabat Pengawas) dan dibantu 2 (dua) orang staf PTT dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Seksi Pelayanan mendapatkan anggaran dan seksi pelayanan Kecamatan Bumi Makmur telah mampu melaksanakan tujuan kinerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024.

Tabel 3.26 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Pelayanan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.997.672	4.651.200	93,07%
TOTAL				**4.997.672**	**4.651.200**	**93,07%**

Tabel 3.27 Tabel Efesiensi Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Tahun 2024 Kasi Pelayanan

CAPAIAN KINERJA 2024	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
100%	**93,07%**	**6,93%**

Pelaksanaan Realisasi Anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan Kecamatan Bumi Makmur, sebagai berikut :

a) Rapat Evaluasi Pelayanan dan Peningkatan Sinergitas Pelayanan Kecamatan Dengan Desa-Desa Di Kecamatan Bumi Makmur

Gambar 11. Rapat Evaluasi Pelayanan dan Peningkatan Sinergitas Pelayanan Kecamatan Dengan Desa-Desa Di Kecamatan Bumi Makmur

b) Rapat Perbaikan Pelaporan dan Sinkronisasi Pelayanan

Gambar 12. Rapat Perbaikan Pelaporan dan Sinkronisasi Pelayanan

c) Pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi Cepat terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK)

Gambar 13. Sosialisasi Aplikasi SI Cantik

Gambar 14 Pelaksanaan Inovasi Si Cantik

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

PIAGAM PENGHARGAAN

LOMBA INOVASI DAERAH TAHUN 2023

TANAH LAUT INNOVATION AWARD

INOVASI

SI CANTIK (PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN MELALUI SISTEM INFORMASI CEPAT TERLAYANI, AMAN, NYAMAN, TERTIB, INOVATIF DAN KONSISTEN)

DARI

KECAMATAN BUMI MAKMUR

SEBAGAI

10 Inovasi Terbaik

Tanah Laut, 2 Desember 2023

PJ BUPATI TANAH LAUT

H. SYAMSIRRAHMAN

Gambar 15 Piagam Penghargaan Inivasi Si Cantik

3) Kendala / Permasalahan yang di hadapi Seksi Pelayanan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana terkait teknologi masih kurang berfungsi maksimal, terutama pada layanan kependudukan.

Adapun solusi yang di ambil untuk mengatasi permasalahan ini menambah jaringan internet dan perlunya peningkatan koordinasi antara kecamatan dan desa. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat Kecamatan Bumi Makmur dengan mencetuskan inovasi pada Pelayanan Surat menyurat di Kecamatan terutama untuk layanan surat pengantar.

4) Solusi Yang di hadapi oleh Kasi Pelayanan

Untuk lebih meningkatkan produk dan layanan yang maksimal agar Kecamatan Bumi Makmur menjadi lebih baik, antara lain :

1. Pelayanan prima, Kecamatan Bumi Makmur sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Tanah Laut yang menyelengggarakan pelayanan Publik harus mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, gratis, memiliki legalitas hukum dan tentunya berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaran pelayanan prima tersebut diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong perkembangan dinamika aktivitas masyarakat.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.
3. Optimalisasi Koordinasi dengan Perangkat Desa se Kecamatan Bumi Makmur selaku Pelayanan Pertama sebelum masyarakat ke kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan yang baik dan efisien.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyaman lingkungan.
5. Untuk fasilitas layanan kependudukan dikoordinasikan optimal bersama dengan Operator SIAK Kecamatan dengan Disdukpencapil.

6. Melaksanakan inovasi Pelayanan melalui website SI CANTIK, mempermudah dalam pengajuan pelayanan surat pengantar yang memerlukan pengesahan dari Kecamatan.

5) Rencana Aksi Yang di Laksanakan oleh Kasi Pelayanan

Untuk mewujudkan solusi dalam mentasi permasalahan yang ada pada Seksi Pelayanan, antara yang lain :

1. Perlunya lebih intensif dalam berkoordinasi antara Kecamatan dengan desa dengan meningkatkan pelayanan masyarakat.
2. Mendiskusikan permasalahan/saran pelayanan melalui rapat evaluasi dan monitoring pelayanan yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dengan melibatkan kepala desa dan aparat desa.
3. Melaksanakan inovasi perubahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mempermudah kepengurusan admnistrasi yaitu surat menyurat, seperti surat pengantgar yang memerlukan pengesahan dari Kecamatan.
4. Konsisten melaksanakan inovasi dan melakukan pembahruan/perbaikan dalam menunjang pelaksanaan inovasi SI CANTIK.
5. Memperkuat Sarana dan Prasarana terutama Jaringan
6. Melaksanakan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa terkait Pelayanan di Desa

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 3.28 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Tahun Anggaran 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Gangguan	0 Gangguan	100%

2	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
Rata - rata Capaian Kinerja Tahun 2024					**100,00%**

Kegiatan pertemuan koordinasi dan fasilitasi kepada masyarakat yang kegiatan tersebut penyampaian tentang regulasi dan teknis peraturan dalam ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Terutama hal aduan tentang penyakit masyarakat / Kejahatan di lingkungan masyarakat dan bahaya narkoba bagi masyarakat , generasi muda.

Gambar 15 Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopincam

Gambar 16 Kegiatan Pembinaan Linmas Kecamatan

Gambar 17 Fasilitasi Kegiatan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Kecamatan Bumi Makmur

Kegiatan pertemuan Pembinaan Perlindungan Masyarakat Dimana kegiatan tersebut penyampaian tentang regulasi dan teknis dalam perlindungan di masyarakat khususnya anggota linmas desa agar lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu.

Selain kegiatan diatas, Tugas dan fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban adalah memberikan koordinasi dengan anggota Linmas Desabersama dengan Aparatur Desa sehingga keselarasan anatar kecamatan dan desa bisa berjalan dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan di seksi ketentraman dan ketertiban yaitu berkurangannya pengaduan ataukasus kriminal di masyarakat serta berkurangnya penyalahgunaan zat adiktif dan terlarang di masyarakat itu sendiri.

1) Analisis Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Ketentraman dan Ketertiban dengan dibantu 1 (satu) orang staf dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Trantib yaitu melakunan pembinaan dan fasiltasi penanganan gangguan dan keamanan , serta membinan kelompok masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban , sosialisasi dan monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai dampak adanya kebijakan daerah Kabupaten Tanah terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah yang menekankan perlunya efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 maka diharapkan satuan kerja perangkat daerah untuk dapat memaksimalkan kegiatan dengan tepat sasaran dan out put yang jelas serta terukur.

Pada posisi lain kegiatan yang harus dilaksanakan pada Seksi Ketentramnan dan ketertiban idealnya memerlukan pembiayaan atau belanja kegiatan yang cukup memadai yang harus diakomodir oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut, mengingat kegiatan ini sangat perlu untuk diberikan dukungan pagu

anggaran pada kegiatan Trantib dalam upaya arah menciptakan kondisi lingkungan yang aman, kondusif dan terkendali, dari bahaya bencana, penyebaran narkoba, bencana alam dan lain-lain. Namun dengan keterbatasan anggaran ini pada Seksi Trantib Kecamatan Bumi Makmur tetap mampu melaksanakan tujuan kinerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024.

Tabel 3.29 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.908.629	35.185.000	78,35%
TOTAL				**44.908.629**	**35.185.000**	**78,35%**

Tabel 3.30 Tabel Efesiensi Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA 2024	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
100%	**74,69%**	**25,31%**

3) Kendala / Permasalahan yang di hadapi Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Pada saat pelaksanaan penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan dihadapkan pada pola pikir dan karekteristik yang berbeda dengan tingkat Pendidikan yang berbeda pula sehingga dibutuhkan waktu untuk kesabaran dalam rangka pembinaan masyarkat.
2. Pada saat penjaringan anggota kelompok masyarakat sebagai anggota Linmas lebih kecenderungan yang berpartisipasi para kaum tua sedang kaum muda tidak punya keinginan untuk menjadi anggota perlindungan masyarakat.
3. Letak wilayah posisi Kecamatan Bumi Makmut Berada dipaling ujung Kabupaten Tanah laut yang berbatasan langsung wilayah dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sehingga diperlulan pengawasan dan monitoring pada posisi yang strategis sangat rawan terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban berupa adanya penyebaran narkoba, tindak

pidana kejahatan dan lain-lain.

4) Solusi Yang di hadapi oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kelompok bersama dengan pihak TNI, Polri, Kesbangpol dan Satpol Pamong Praja dan Kementerian agama serta UPTD Puskemas setempat tentang pentingnya mengutamakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kenakalan remaja dan bahaya narkoba kepada usia remaja khususnya.
2. Memotivasi kelompok masyarakat dan kaum muda secara terus menerus yang dilakukan oleh Kasi Trantib bersama dengan TNI dan Polri untuk dapat terlibat nantinya dalam bela negara
3. Melakukan sosialisasi kepada para remaja dan pelajar oleh instasi terkait yang difasiltasi oleh Kasi Trantib dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tentang bahaya narkoba bagi Wlayah Kecamatan Bumi Makmur.

5) Rencana Aksi Yang Dilakukan Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dengan dengan pihak TNI, Polri, para tokoh agama, masyarakat, dalam upaya pentingnya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan kenakalan remaja dan bahaya narkoba kepada usia remaja khususnya.
2. Perlu penekanan dan mensosialisasikan secara berkala pentingya kelompok masyarakat kaum muda dalam sebagai wujud kepedulian dan kewaspadaan bersama dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman keamanan lingkungan.
3. Melakukan sinergitas dan koordinasi dengan TNI dan Polri secara intensif untuk dapat melakukan pencegahan dini dalam hal memerangi Narkoba serta pemberatasan kepada pengedar dan pengguna Narkoba di Kecamatan Bumi Makmur.

e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.31 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
4	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
5	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	18 Paket	75%
6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
7	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
8	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
9	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
10	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	400 Laporan	100%
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%

14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2024					**98%**

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 18 (delapan belas) orang ASN dan 5 (Orang) orang PTT. Terkait pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran terlayani dengan baik dengan capaian realisasi target indikator sebesar 98 %. Sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik pada saat ini sebanyak 224 unit yang terdaftar dalam inventarisasi barang unit dalam kategori baik.

Kegiatan utama yang dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tahun anggaran 2024 antara lain penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional lainnya serta pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa pembayaran honorarium pegawai tidak tetap.

Gambar 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1) Analisis Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Selaku Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan pembinaan dan fasilitasi penanganan gangguan dan keamanan , serta membinaan kelompok masyarakat dibidang Umum dan Kepegawaian, yaitu melakukan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, serta memberikan pelayanan administrasi perkantoran kepada ASN dilingkungan kerja pada Kantor Kecamatan Bumi Makmur.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

tahun anggaran 2024 , untuk kegiatan tersebut ditunjang oleh 1 (satu) program, 4 (Empat) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 862.235.238,- . Pada akhir tahun 2024 capaian realisasi keuangan sub bagian umum dan kepegawaian sebesar Rp. 725.563.272,- atau 84,15% dengan efesiensi kinerja 8,96%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasubbag Umpeg Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024
1	Program penunjangan urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.005.750	16.110.000	73,21%
2		Administrasi umum dan perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.957.072	2.915.686	98,60%
3			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	136.368.874	128.909.624	94,53%
4			Penyediaan peralatan rumah tangga	3.972.195	3.367.000	84,76%
5			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.998.452	5.363.000	67,05%
6			Penyediaan bahan / material	21.838.659	21.095.000	96,59%
7			Penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	281.500.000	279.412.192	99,26%
8		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111.450.000	35.601.617	31,94%
9			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	181.144.236	141.375.629	78,05%
10		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pemeiiharan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	30.000.000	29.962.800	99,88%

		atau kendaraan dinas jabatan			
11		Penyediaan jasa pemeiiharan, biaya pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	63.000.000	61.450.724	97,54%
TOTAL			**862.235.238**	**725.563.272**	**84,15%**

Tabel 3.33 Tabel Efesiensi Program , Kegiatan, Sub Kegiatan Kasubbag Umpeg Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA 2024	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
100%	**84,15%**	**16,24%**

3) Kendala / Permasalahan yang di hadapi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Kurangnya petugas staf terutama ASN dalam pengelolaan kearsipan terutama dalam mengerjakan tugas-tugas inventarisasi kearsipan, tata kelola surat menyurat masuk dan keluar.
2. Terlalu banyak regulasi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif dan efesien.
3. Terbatasnya pendanaan untuk pengadaan barang sarana dan prasarana sehingga untuk pengadaannya tidak dapat dianggarkan terutama untuk pengadaan Mebel.
4. Kurangnya partisipasi ASN dalam pemenuhan data-data kepegawaian yang diperlukan pada saat finalisasi usulan tertentu yang harus dilengkapi.

4) Solusi permasalahan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Melakukan usulan penambahan pegawai staf ASN yang akan ditugaskan nantinya untuk mengelola kearsipan yang diharapkan nantinya punya

keahlian khusus menyusun arsip, terkait dalam hal penataan arsip dengan mengadakan pemilahan yang jelas mana arsi statis dan yang dinamis , serta didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai.

2. Melakukan sosialisasi dan promosi terkait pemanfaatan aplikasi sosialita bagi penyedia barang dan jasa untuk dapat berkontribusi dan mengikutsertakan para penyedia jasa dalam hal ini pngusaha UMKN dalam pembangunan daerah di Kecamatan Bumi Makmur.
3. Meinventarisir secara terperinci kebutuhan sarana dan prasarana yang di dibutuhkan kantor.
4. Selalu meusulkan penganggaran untuk pengadaan Mebel akan tetapi sub kegiatan tidak disetujui tanpa alasan yang jelas.
5. Penerapan disiplin yang maksimal dan penegasan langsung oleh atasan langsung dalam pemenuhan kebutuhan akan data-data kepegawaian yang diperlukan pada batasan waktu tertentu.

5) Rencana Aksi yang akan dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Memanfaatkan pegawai PTT yang ada untuk membantu dalam pengelolaan kearsipan pada Kantor Kecamatan Bumi Makmur.
2. Melakukan kerjasama terutama para penyedia jasa para UMKN agar dapat bergabung dalam aplikasi Sosialita Katalog lokal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Pelayanan barang dan jasa yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk memudahkan Staf ASN pada Kecamatan Bumi Makmur dalam memanfaatkan dan menggunakan aplikasi Sosialita dan mempergunakan dalam penatausahaan keuangan daerah
3. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan pihak lain terkait pengadaan barang sarana dan prasarana kantor
4. Kembali meusulkan belanja mebel pada anggaran perubahan atau anggaran murni 2026.
5. Meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan kepada ASN dalam mendukung tertibnya administrasi kepegawaian

f. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 3.34 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	18 Orang	95%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2024					**98%**

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan pada Kecamatan Bumi Makmur yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa Dokumen RPD 2024-2026 Dokumen Renja 2024, Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024, Dokumen RKA Tahun 2024 dan RKA Perubahan Tahun 2024, Dokumen DPA dan DPA-Perubahan 2024 . Dengan demikian realisasi capaian target sesuai target (100%).

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Laporan Kinerja Pemerintahan 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2024 , Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2024 dan Laporan Keuangan semesteran, triwulan, bulanan dan prognosis 2024. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai 100%

1) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Perencanaan dan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang yaitu 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan

arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan kegiatan perencanaan kinerja dan keuangan, laporan keuangan dan laporan kinerja.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2024, sub bagian perencanaan dan keuangan ditunjang oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 3.107.557.763, capaian realisasi keuangan sub bagian perencanaan dan keuangan mencapai 89,51% atau realisasi Rp. 2.781.583.834,- dengan efesiensi kinerja 10,49%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.35 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.107.557.763	2.781.583.834	89,51%
TOTAL				**3.107.557.763**	**2.781.583.834**	**89,51%**

Tabel 3.36 Tabel Efesiensi Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA 2024	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
100%	**89,51%**	**10,49%**

3) Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Terbatasnya staf /ASN yang menangani kegiatan pembuatan laporan perencanaan SKPD berupa Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).

2. Kurangnya pengetahuan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi staf subbag perencanaan dan keuangan dalam pemenuhan tugas-tugas pekerjaan terkait informasi peraturan perundangan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk menyusun laporan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan manual maupun aplikasi yang telah disediakan oleh kemendagri RI, BPKP dan Kemenkeu RI.
3. Kesulitan mengumpulkan Dokumen – dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan untuk tahun sebelumnya dikarenakan intensnya pergeseran jabatan Kasubag Perencanaan dan Keuangan di Kecamatan Bumi Makmur sehingga kesulitan dalam hal penyusunan Perencanaan tahun berjalan dan berikutnya.

4) Solusi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Melakukan penambahan personel staf/ASN subbag Perencanaan dan Keuangan yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Melakukan usulan pagu anggaran kepada SKPD terkait mengenai pendidikan dan pelatihan bagi staf/ASN Subbag Perencanaan dan Keuangan mengikuti Bimbingan teknis, Diklat bidang perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka peningkatan wawasan personil di bidang perencanaan.

5) Rencana aksi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Melakukan bimbingan dan transfer *knowledge* kepada staf/ASN subbag perencanaan dan keuangan dalam rangka pemerataan pembagian tugas dan pekerjaan sesuai peruntukkannya agar penyelesaian pekerjaan menjadi tepat waktu sesuai aturan perundangan- undangan.
2. Melakukan pemanfaatan staf/ASN perencanaan dengan menggunakan kemampuan dalam penyajian data-data berupa hardware dan software untuk

penyusunan perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban melaporkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

3. Mengumpulkan dan mengolah kembali data – data Perencanaan dan Pelaporan untuk selanjutnya disimpan sebagai bahan referensi untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan yang akan dating.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2024 untuk eselon IV mencapai 98,50%. Untuk lebih jelasnya Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2022-2024 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.37 Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
KASI PELAYANAN				
KINERJA KEGIATAN				
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
KINERJA SUB KEGIATAN				
Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
KINERJA KEGIATAN				
Meningkatnya Layanan terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%	100%	100%
KINERJA SUB KEGIATAN				
Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	-	-	-
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-

KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
KINERJA KEGIATAN				
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100%	100%	100%
KINERJA SUB KEGIATAN				
Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	8 Jenis	8 Jenis	100%
KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
KINERJA KEGIATAN				
Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Gangguan	0 Gangguan	100%
KINERJA SUB KEGIATAN				
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
KASI TATA PEMERINTAHAN				
KINERJA KEGIATAN				
Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
KINERJA SUB KEGIATAN				
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang	15 Orang	100%
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	-	-	-
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
KINERJA KEGIATAN				
Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
KINERJA SUB KEGIATAN				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	18 Orang	95%
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
KINERJA KEGIATAN				
Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
KINERJA SUB KEGIATAN				
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	18 Paket	75%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100%

7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dari atas 4 (Empat) Program yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan yang diamanatkan pelaksanannya kepada Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 yaitu Pagu APBD Murni Awal sebesar Rp. 5.014.796.696,- setelah APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 5.329.365.974,-. Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp. 4.609.578.076,- dengan capaian sebesar 86,49 % dari pagu Perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Bumi Makmur yang ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.38 Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV	Realisasi	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan	Keuangan	
			(Rp)	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.655.223.723,00**	**3.969.793.001,00**	3.969.793.001,00	3.507.147.106,00	88,35%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.957.557.763,00**	**3.107.557.763,00**	3.107.557.763,00	2.781.583.834,00	89,51%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.557.763,00	3.107.557.763,00	3.107.557.763,00	2.781.583.834,00	89,51%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22.005.750,00**	**22.005.750,00**	22.005.750,00	16.110.000,00	73,21%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.005.750,00	22.005.750,00	22.005.750,00	16.110.000,00	73,21%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**317.815.974,00**	**454.635.252,00**	454.635.252,00	441.062.502,00	97,01%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.957.072,00	2.957.072,00	2.957.072,00	2.915.686,00	98,60%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.049.596,00	136.368.874,00	136.368.874,00	128.909.624,00	94,53%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.972.195,00	3.972.195,00	3.972.195,00	3.367.000,00	84,76%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.998.452,00	7.998.452,00	7.998.452,00	5.363.000,00	67,05%
Penyediaan Bahan/Material	21.838.659,00	21.838.659,00	21.838.659,00	21.095.000,00	96,59%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	281.500.000,00	281.500.000,00	279.412.192,00	99,26%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**264.844.236,00**	**292.594.236,00**	292.594.236,00	176.977.246,00	60,49%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.700.000,00	111.450.000,00	111.450.000,00	35.601.617,00	31,94%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236,00	181.144.236,00	181.144.236,00	141.375.629,00	78,05%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.000.000,00**	**93.000.000,00**	93.000.000,00	91.413.524,00	98,29%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	29.962.800,00	99,88%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	61.450.724,00	97,54%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**59.896.917,00**	**59.896.917,00**	59.896.917,00	57.639.020,00	96,23%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**59.896.917,00**	**59.896.917,00**	59.896.917,00	57.639.020,00	96,23%

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.997.672,00	4.997.672,00	4.997.672,00	4.651.200,00	93,07%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.899.245,00	54.899.245,00	54.899.245,00	52.987.820,00	96,52%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00%

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**1.263.891.540,00**	**1.263.891.540,00**	1.263.891.540,00	1.011.506.950,00	80,03%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**1.263.891.540,00**	**1.263.891.540,00**	1.263.891.540,00	1.011.506.950,00	80,03%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.387.817,00	99.387.817,00	99.387.817,00	93.741.950,00	94,32%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.119.595.094,00	1.119.595.094,00	1.119.595.094,00	882.580.000,00	78,83%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.908.629,00	44.908.629,00	44.908.629,00	35.185.000,00	78,35%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**35.784.516,00**	**35.784.516,00**	35.784.516,00	33.285.000,00	93,02%

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**35.784.516,00**	**35.784.516,00**	35.784.516,00	33.285.000,00	93,02%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	100,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.985.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	13.320.000,00	88,89%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.959.516,00	10.959.516,00	10.959.516,00	10.125.000,00	92,39%
	5.014.796.696	**5.329.365.974**	**5.329.365.974**	**4.609.578.076**	**86,49%**

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Setelah pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan anggaran belanja sebesar Rp. 5.329.365.974,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 4.609.578.076,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 86,49 % dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 719.787.898,- (14%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.39 .Realisasi Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
BELANJA DAERAH	5.329.365.974,00	4.609.578.076,00	86,49	4.285.077.254,00
BELANJA OPERASI	5.218.711.175,00	4.530.608.076,00	86,81	4.239.177.254,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	5.218.711.175,00	4.530.608.076,00	86,81	4.239.177.254,00
BELANJA MODAL	110.654.799,00	78.970.000,00	71,37	45.900.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	110.654.799,00	78.970.000,00	71,37	45.900.000,00
JUMLAH BELANJA	**5.329.365.974,00**	**4.609.578.076,00**	**86,49**	**4.285.077.254,00**
SURPLUS/DEFISIT	**(5.329.365.974,00)**	**(4.609.578.076,00)**	**86,49**	**(4.285.077.254,00)**

2. Anggaran dan Realisasi APBD 2024 Berdasarkan Program dan Kegiatan

Tabel 3.40. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kantor Kecamatan Bumi Makmur

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja	
	Operasi	
	Anggaran	Realisasi
2	3	4
UNSUR KEWILAYAHAN	5.329.365.974	4.609.578.076
KECAMATAN	5.329.365.974	4.609.578.076
Kantor Kecamatan Bumi Makmur	5.329.365.974	4.609.578.076
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.969.793.001	3.507.147.106
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.107.557.763	2.781.583.834
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.005.750	16.110.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.635.252	441.062.502
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.594.236	176.977.246
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.000.000	91.413.524
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.896.917	57.639.020

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	59.896.917	57.639.020
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.263.891.540	1.011.506.950
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.263.891.540	1.011.506.950
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.784.516	33.285.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.784.516	33.285.000
Jumlah	**5.329.365.974**	**4.609.578.076**

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Pada tahun 2023 ada program 6 (enam) dan 9 (Sembilan) kegiatan dan 2 1 (d u a p u l u h s a t u) sub kegiatan, dibandingkan tahun 2024 jumlah 4 (Empat) Program yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan. Adapun untuk anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.983.255.766,- yang mengalami kenaikan pagu sebesar Rp. 346.110.208,- dibandingkan anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 5.329.365.974,- .Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41 Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Bumi Makmur TA. 2022-2024

TAHUN 2022			**TAHUN 2024**		
Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
6	9	21	4	9	21
TOTAL ANGGARAN : Rp. 4.983.255.766			**TOTAL ANGGARAN : Rp. 5.329.365.974**		

Adapun realisasi Belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.609.578.076,- dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 4.285.077.254,-. mengalami kenaikan realisasi dibanding tahun 2024. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan tidak dapat direalisasikan karena Kecamatan sudah tidak diperkenankan memungut IMB Non Komersil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.42 Realisasi Belanja APBD Tahun 2024 Terhadap 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
BELANJA DAERAH	**5.329.365.974,00**	**4.609.578.076,00**	**86,49**	**4.285.077.254,00**
BELANJA OPERASI	**5.218.711.175,00**	**4.530.608.076,00**	**86,81**	**4.239.177.254,00**
Belanja Pegawai	3.107.557.763,00	2.781.583.834,00	89,51	2.430.126.089,00

Belanja Barang dan Jasa	1.111.153.412,00	984.024.242,00	88,56	809.051.165,00
Belanja Hibah	1.000.000.000,00	765.000.000,00	76,50	1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**5.218.711.175,00**	**4.530.608.076,00**	**86,81**	**4.239.177.254,00**
BELANJA MODAL	**110.654.799,00**	**78.970.000,00**	**71,37**	**45.900.000,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.904.799,00	78.970.000,00	95,25	45.900.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	**110.654.799,00**	**78.970.000,00**	**71,37**	**45.900.000,00**
JUMLAH BELANJA	**5.329.365.974,00**	**4.609.578.076,00**	**86,49**	**4.285.077.254,00**
SURPLUS/DEFISIT	**(5.329.365.974,00)**	**(4.609.578.076,00)**	**86,49**	**(4.285.077.254,00)**

Adapun perbandingan realisasi APBD 2024 terhadap 2023, dapat dilihat bahwa untuk pendapatan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.0,- atau 0%,karena adanya pengalihan pengelolaan pendapatan berupa hasil retribusi daerah berupa pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) non komersial tidak lagi diterima karena hal tersebut sudah dikelola oleh PTSP Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.43 Perbandingan realisasi belanja APBD 2024 terhadap APBD 2023 pada Belanja Tidak Langsung dan Langsung Kecamatan Bumi Makmur

NO	Uraian	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	%
1.	Belanja Tidak Langsung :				
	Belanja Pegawai	2.781.583.834	89,51	2.430.126.089	80,16
	Belanja Hibah	765.000.000	76,50	1.000.000.000	100
2.	Belanja Langsung :				
	Belanja Barang dan Jasa	984.024.242	88,56	809.051.165	89,53
	Belanja Modal	78.970.000	92,25	45.900.000	95,81

Untuk SKPD Kecamatan Bumi Makmur, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja fisik dan keuangan dari keseluruhan program dan kegiatannya. Walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih belum maksimal, akan tetapi secara umum tidak menjadi masalah yang berarti

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. LKj ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKJ ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dan diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan SKPD Kecamatan Bumi Makmur untuk lebih produktif lagi dimasa yang akan dating sehingga Visi dan Misi SKPD Kecamatan Bumi Makmur dapat terwujud. Oleh karena itu mulai saat ini upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus di tumbuhkembangkan. Tantangan kedepan tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin kompleks dan rumit

Berdasarkan dari penjelasan LKJ yang telah dibuat, maka beberapa hal dapat disimpulkan :

1. Capaian sasaran kinerja Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun 2024 secara keseluruhan sudah cukup baik, dan dari 2 (indikator) sasaran sudah tercapai semuanya walaupun hasilnya masih perlu perbaikan dimasa yang akan datang.
2. Capaian IKU Sasaran 1 Indikator 1 pada tahun ke 1 RPD (2024-2026) adalah 80 %, dibuat berdasarkan Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan.
3. Capaiain IKU Sasaran 1 Indikator 2 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah 92.13 dari target 90, dengan nilai capaian sebesar 102.4%, dan termasuk kategori **Sangat Memuaskan**.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia aparaturnya, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak terkait, namun tidak pula dipungkiri masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus diselesaikan.

Adapun strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Bumi Makmur yang kondusif dengan masyarakat yang patuh terhadap aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan, instansi terkait, dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Pada akhirnya, semoga dengan adanya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, dapat memberikan manfaat dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Makmur, 20 Januari 2024

Plt. Camat Bumi Makmur ,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. **IKU**
2. **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
3. ***CASCADING* / POHON KINERJA**
4. **CAPAIAN PER TRIWULAN (1 - 4)**
5. **MONEV RENSTRA**
6. **MATRIK KESELARASAN**

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN

Kabupaten : Tanah Laut
Nama SKPD : Kecamatan Bumi Makmur

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Fungsi :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada	Kecamatan
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	

CAMAT BUMI MAKMUR

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

SAHIDANOR, S.Sos., M.Si
NIP. 19661061986011002

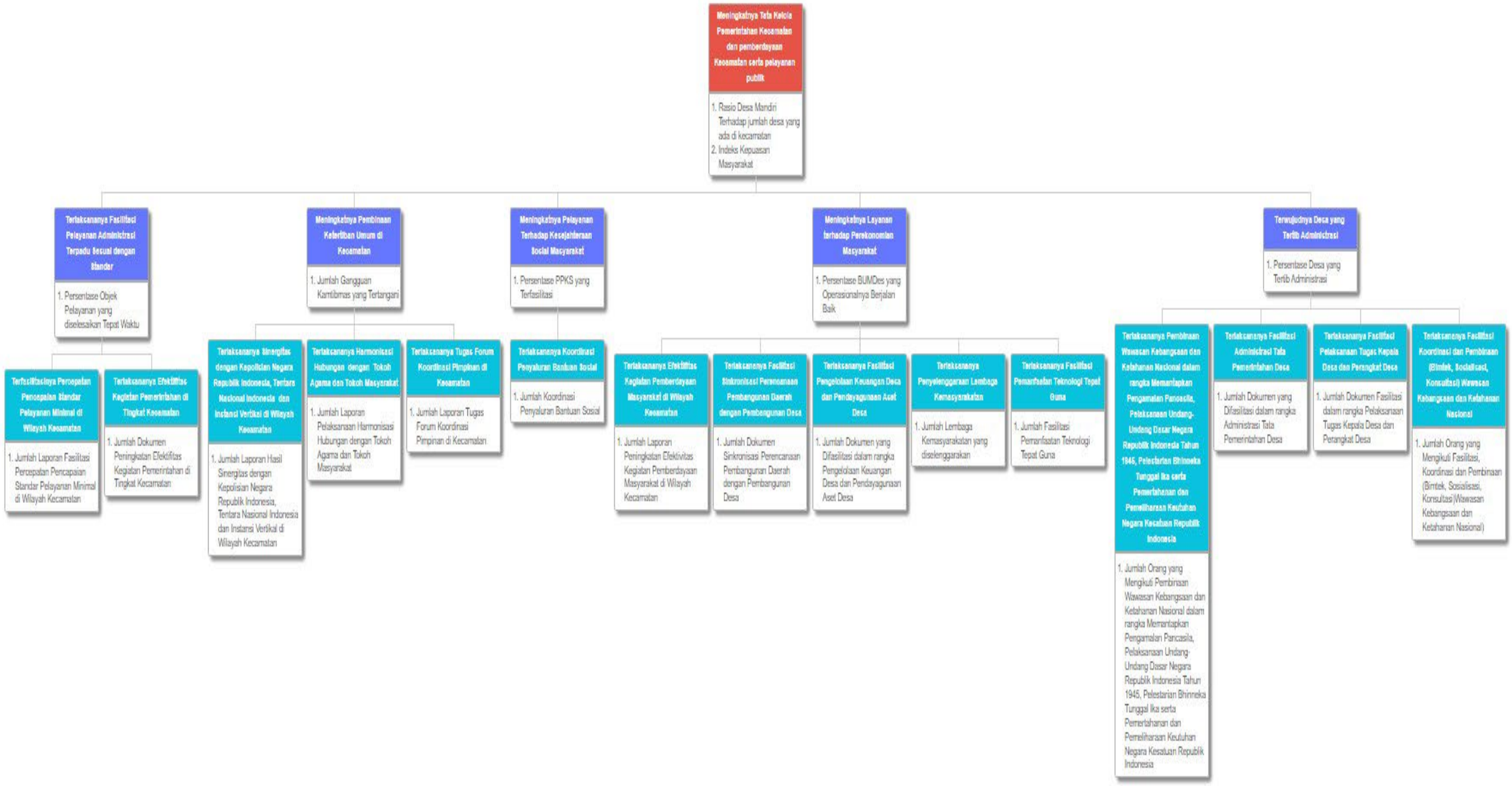
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik
1. Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar
1. Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu
Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan
1. Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1. Persentase PPKS yang Terfasilitasi
Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial
1. Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial
Meningkatnya Layanan terhadap Perekonomian Masyarakat
1. Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik
Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
1. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1. Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi
1. Persentase Desa yang Tertib Administrasi
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
1. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
1. Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SYAMSIR RAHMAN**
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akanmelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
PJ. BUPATI TANAH LAUT	CAMAT BUMI MAKMUR
SYAMSIR RAHMAN	**SAHIDANOR S.Sos., M.Si**
	NIP. 196611061986011002

PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD MURNI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	**Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur**			
	1	Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	75
2	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik**			
	1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Nilai	0.45
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
7.01	**KECAMATAN**	**5.014.796.696**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**59.896.917**
7.01.02.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**59.896.917**
7.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.997.672
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.899.245
7.01.02.2.01	**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**0,00**
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**0,00**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**0,00**
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00
7.01.03.2.03	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**0,00**
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0,00
7.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**0,00**
7.01.04.2.01	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**0,00**
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00

7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.263.891.540**
7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1.263.891.540**
7.01.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.387.817
7.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.119.595.094
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.908.629
7.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**35.784.516**
7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**35.784.516**
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.840.000
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.985.000
7.01.06.2.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.959.516
7.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.655.223.723**
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.957.557.763**
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.557.763
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**22.005.750**
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.005.750
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**317.815.974**
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.957.072
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.049.596
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.972.195

7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.998.452
7.01.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	21.838.659
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000
7.01.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah**	**0,00**
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0,00
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00
7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**264.844.236**
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.700.000
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236
7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**93.000.000**
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN

Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR

SAHIDANOR, S.Sos., M.Si
NIP. 196611061986011002

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINI AMBARWATI, ST, M.Sos**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SEKSI PELAYANAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**RINI AMBARWATI, ST, M.Sos**
NIP. 196611061986011002	NIP. 198002152015032001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan
2	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11 Dokumen

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.997.672**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**4.997.672**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.997.672	

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
CAMAT BUMI MAKMUR

SAHIDANORS.Sos., M.Si
NIP. 196611061986011002

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PELAYANAN

RINI AMBARWATI, ST, M.Sos
NIP. 198002152015032001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FATIMAH, SST., MM**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**FATIMAH, SST., MM**
NIP. 196611061986011002	NIP. 196909101990032007

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Meningkatnya Layanan terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan
2	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	2 Lembaga
5	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Desa

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**54.899.245**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**54.899.245**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.899.245	
2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**25.944.516**	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**25.944.516**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	14.985.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.959.516	
TOTAL		**80.843.761**	

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
CAMAT BUMI MAKMUR

SAHIDANOR, S.Sos., M.Si
NIP. 196611061986011002

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN

FATIMAH, SST., MM
NIP. 196909101990032007

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD SYAIRANI, S.ST**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnyasesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akanmelakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**AHMAD SYAIRANI, S.ST**
NIP. 196611061986011002	NIP. 196606261989031012

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Gangguan
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan
2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11 Laporan
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Laporan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**44.908.629**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**44.908.629**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.908.629	
TOTAL		**44.908.629**	

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**AHMAD SYAIRANI, S.ST**
NIP. 196611061986011002	NIP. 196606261989031012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MULYADI, S.Kep., M.M**
Jabatan : **KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**MULYADI, S.Kep., M.M**
NIP. 196611061986011002	NIP. 197701011996031005

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100%
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	8 Jenis

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.119.595.094**	
	Kegiatan Penyelenggaran urusan pemerimtahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**1.119.595.094**	
	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewuudkan stabiltas keamanan lokal. Regional dan Nasional	1.119.595.094	
TOTAL		**1.119.595.094**	

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**MULYADI, S.Kep., M.M**
NIP. 196611061986011002	NIP. 197701011996031005

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP**
NIP. 196611061986011002	NIP. 199502272017081001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang
2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	15 Orang

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**99.387.817**	
	Kegiatan Penyelenggaaran urusan pemerimtahan umum sesuai penugasan kepala daerah	**99.387.817**	
	Sub Kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045, Pelestarian Bhinneka Tunngal ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.387.817	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**9.840.000**	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**9.840.000**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.840.000	
TOTAL		**109.227.817**	

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua

CAMAT BUMI MAKMUR

SAHIDANOR, S.Sos., M.Si

NIP. 196611061986011002

Pihak Pertama

KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP

NIP. 199502272017081001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GILANG PRADANA, S.STP,. M.IP**
Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	SEKRETARIS CAMAT
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**GILANG PRADANA, S.STP,. M.IP**
NIP. 196611061986011002	NIP. 198910252010101001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	22
		Nilai Komponen Pengukuran	22
		Nilai Komponen Pelaporan	11
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
		Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**3.655.223.723**	
	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	**2.957.557.763**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.557.763	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22.005.750**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	22.005.750	
	Kegiatan Administrasi umum dan perangkat daerah	**317.815.974**	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.957.072	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91.049.596	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	3.972.195	
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.998.452	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan / material	21.838.659	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	190.000.000	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**264.844.236**	

	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	83.700.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.000.000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000	
TOTAL		**3.655.223.723**	

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	SEKRETARIS CAMAT
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**GILANG PRADANA, S.STP, M.IP**
NIP. 196611061986011002	NIP. 198910252010101001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.SULIMIN, S.Sos., M.AP**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**H.SULIMIN, S.Sos., M.AP**
NIP. 196611061986011002	NIP. 196704241993031012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**2.957.557.763**	
	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	**2.957.557.763**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.557.763	
TOTAL		**2.957.557.763**	

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua
CAMAT BUMI MAKMUR

SAHIDANOR, S.Sos., M.Si
NIP. 196611061986011002

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

H.SULIMIN, S.Sos., M.AP
NIP. 196704241993031012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TATI HARDIYANTI, AM.KL**
Jabatan : **PLT KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	PLT KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**TATI HARDIYANTI, AM.KL**
NIP. 196611061986011002	NIP. 197911032009062001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
2	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
4	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
6	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**697.665.960**	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22.005.750**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.005.750	
	Kegiatan Administrasi umum dan perangkat daerah	**317.815.974**	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.957.072	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91.049.596	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	3.972.195	
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.998.452	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	21.838.659	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	190.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**264.844.236**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.700.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.000.000**	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000	
TOTAL		**697.665.960**	

Tanah Laut, 01 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	PLT KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**TATI HARDIYANTI, AM.Kl**
NIP. 196611061986011002	NIP. 197911032009062001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GILANG PRADANA, S.STP,. M.IP**
Jabatan : **SEKRETARIS CAMAT**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	SEKRETARIS CAMAT
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**GILANG PRADANA, S.STP,. M.IP**
NIP. 196611061986011002	NIP. 198910252010101001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA UTAMA**		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	22
		Nilai Komponen Pengukuran	22
		Nilai Komponen Pelaporan	11
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
		Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**3.819.793.001**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.957.557.763**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.557.763	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22.005.750**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.005.750	
	Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	**454.635.252**	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.957.072	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	136.368.874	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	3.972.195	
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.998.452	

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	21.838.659	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	281.500.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**292.594.236**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.450.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.000.000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000	
TOTAL		**3.819.793.001**	

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	SEKRETARIS CAMAT
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**GILANG PRADANA, S.STP, M.IP**
NIP. 196611061986011002	NIP. 198910252010101001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.SULIMIN, S.Sos., M.AP**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**H.SULIMIN, S.Sos., M.AP**
NIP. 196611061986011002	NIP. 196704241993031012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**3.107.557.763**	
	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	**3.107.557.763**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.107.557.763	
TOTAL		**3.107.557.763**	

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua
CAMAT BUMI MAKMUR

SAHIDANOR, S.Sos., M.Si
NIP. 196611061986011002

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

H.SULIMIN, S.Sos., M.AP
NIP. 196704241993031012

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TATI HARDIYANTI, AM.KL**
Jabatan : **PLT KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAHIDANOR, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **CAMAT BUMI MAKMUR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	PLT KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**TATI HARDIYANTI, AM.KL**
NIP. 196611061986011002	NIP. 197911032009062001

PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	**KINERJA KEGIATAN**		
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
2	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
4	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
B	**KINERJA SUB KEGIATAN**		
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
6	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
	1	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**862.235.238**	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**22.005.750**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.005.750	
	Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	**454.635.252**	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.957.072	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	136.368.874	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	3.972.195	
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.998.452	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	21.838.659	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	281.500.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**292.594.236**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.450.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.144.236	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**93.000.000**	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.000.000	
TOTAL		**862.235.238**	

Tanah Laut, 19 September 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CAMAT BUMI MAKMUR	PLT KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SAHIDANOR, S.Sos., M.Si	**TATI HARDIYANTI, AM.Kl**
NIP. 196611061986011002	NIP. 197911032009062001

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024
CAMAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	2	3	4												
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	**0,45**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,36**
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**90**	-	-	**89,69**	-	-	**92,24**	-	-	**92,29**	-	-	**94,31**

Plt. Camat Bumi Makmur

SILANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024
KASI PELAYANAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
1	2	3	4												
1	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	-	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

CHANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19691025 201010 1 001

Kasi Pelayanan,

RINI AMBARWATI, ST, M.Sos
NIP. 198002152015032001

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024

KASI PMD

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
1	2	3	4												
1	Meningkatnya Layanan terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	-	-	3 Laporan	-	-	3 Laporan	-	-	3 Laporan	-	-	2 Laporan
3	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	-	11 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Dokumen
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	5 Lembaga	-	-	5 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11 Laporan	-	-	11 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

SILANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,

FATIMAH, SST., MM
NIP. 196909101990032007

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024
KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
1	2	3	4												
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	8 Jenis	-	-	8 Jenis	-	-	8 Jenis	-	-	8 Jenis	-	-	8 Jenis

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

GILANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19891028 201010 1 001

Kasi Kesejahteraan Masyarakat,

MULYADI, S.Kep., M.M
NIP. 197701011996031005

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024

KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
1	2	3	4												
1	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan	0 Gangguan
2	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
3	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	-	1 dokumen

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

GILANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

Plt. Kasi Keamanan dan Ketertiban,

YUSUP, S.Pd,MM
NIP. 19710417 200604 1 005

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024
KASI TATA PEMERINTAHAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
1	2	3	4												
1	Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang	-	-	-	-	-	-	-	15 Orang	-	-	-	-
3	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	50 Orang	-	-	-	-	-	-	50 Orang	-	-	-	-	-

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

SILANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19851025 201010 1 001

Kasi Tata Pemerintahan,

ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP
NIP. 199502272017081001

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024
SEKRETARIS CAMAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai Komponen Perencanaan	22				21,6								
		Nilai Komponen Pengukuran	22				21								
		Nilai Komponen Pelaporan	11				10,5								
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20				19								
		Hasil Survey Pelayanan Kesektariatan	90												90,88

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

GILANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

Sekretaris Camat

GILANG PRADANA, S.STP, M.
NIP. 19891025 201010 1 001

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
1	2	3	4												
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang

Mengetahui,
PLT. Camat Bumi Makmur

GILANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

H.SULIMIN, S.Sos., M.AP
NIP. 196704241993031012

PENGUKURAN KINERJA SKPD TRIWULAN TAHUN 2024
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi Per Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
1	2	3	4												
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
2	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
3	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
4	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
5	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	-	18 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	-	7 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	-	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-
10	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Paket	-
11	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	-	-	150	-	-	50	-	-	150	-	-	50
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

GILANG PRADANA, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

TATI HARDIYANTI, AM.KL
NIP. 197911032009062001

CAPAIAN IKU 2024
KECAMATAN BUMI MAKMUR

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	TAHUN 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	**0,45**	**0,36**	**80%**
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	**90,00**	**92,13**	**102.4 %**
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	**75,00**	**72,10**	**96,13%**

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

CAPAIAN PK 2024
KECAMATAN BUMI MAKMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**CAMAT**				
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,45	0,36	80%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	92,13	102.4 %
2	**SEKRETARIS CAMAT**				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	Nilai Komponen Perencanaan	22	21,60	98%
		Nilai Komponen Pengukuran	22	21,00	95%
		Nilai Komponen Pelaporan	11	10,50	95%
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	19	95%
		Hasil Survey Pelayanan Kesektariatan	90	90,88	101%
3	**KASI PELAYANAN**				
	KINERJA KEGIATAN				
	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
	KINERJA SUB KEGIATAN				
	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	
4	**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**				
	KINERJA KEGIATAN				
	Meningkatnya Layanan terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%	100%	100%
	KINERJA SUB KEGIATAN				
	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	-	-	-
	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-
5	**KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
	KINERJA KEGIATAN				
	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	100%	100%	100%
	KINERJA SUB KEGIATAN				
	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	8 Jenis	8 Jenis	100%
6	**KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN**				
	KINERJA KEGIATAN				
	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	2 Gangguan	0 Gangguan	100%
	KINERJA SUB KEGIATAN				
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11 Laporan	11 Laporan	100%
7	**KASI TATA PEMERINTAHAN**				
	KINERJA KEGIATAN				
	Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
	KINERJA SUB KEGIATAN				

	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang	15 Orang	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	-	-	-
8	**KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**				
	KINERJA KEGIATAN				
	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	KINERJA SUB KEGIATAN				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang	18 Orang	95%
9	**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**				
	KINERJA KEGIATAN				
	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Optimal	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
	KINERJA SUB KEGIATAN				
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	18 Paket	75%
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	100%
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100%

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001

MATRIK KESELARASAN
KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/ BUKAN IKU	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp.)	
						NO	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik		Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan		Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	90 Nilai		1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		54.899.245	
						2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	0.45 Nilai		1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		99.387.817	
															Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		1.119.595.094	
															Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		44.908.629	
						3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	0.45 Nilai		1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9.840.000	
															Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		14.985.000	
															Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		10.959.516	
2			Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	0.45 Nilai		1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan Tepat Waktu	Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		4.997.672	

3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur		Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur		Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur	0.45 Nilai		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal□	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.107.557.763	
											2	Kegiatan Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Optimal□	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		22.005.750	
											3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal□	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah□	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.957.072	
															Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		136.368.874	
															Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.972.195	
															Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		7.998.452	
															Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material		21.838.659	
															Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		281.500.000	
											4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik□	Indeks Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		111.450.000	
															Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		181.144.236	
											5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	Jumlah Kendaraan R2 Jumlah Kendaraan R4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		30.000.000	
														Jumlah Jenis Barang Jumlah Peralatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		63.000.000	
JUMLAH																	**5.329.365.974**	

Mengetahui,
Plt. Camat Bumi Makmur

Gilang Pradana, S.STP, M.I.P
NIP. 19891025 201010 1 001